

## SKRIPSI

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK (DP3A) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI SOSIAL  
EKONOMI PEREMPUAN DI KOTA PAREPARE**



**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2025**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK (DP3A) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI SOSIAL  
EKONOMI PEREMPUAN DI KOTA PAREPARE**



**OLEH :**

**NITA RAHMAYANTI**

**NIM : 2020203870231016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Ushluddin, Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2025**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nita Rahmayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203870231016

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
B-1762/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/2023

Pembimbing Utama : Disetujui Oleh :  
Dr. Nurhikmah, M. Sos. I.  
(.....)

NIP : 19810907 200901 2 005

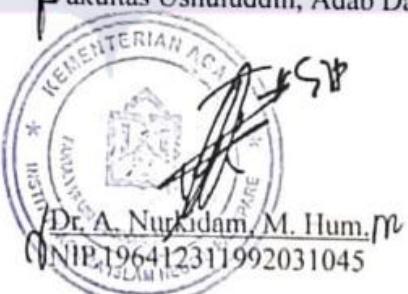
Pembimbing Pendamping : A. Nurul Mutmainnah, M. Si.  
(.....)

NIP : 198911062020122017

Mengetahui :

Dekan,

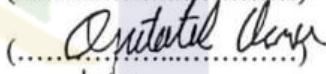
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare
Nama Mahasiswa	:	Nita Rahmayanti
Nomor Induk Mahasiswa	:	2020203870231016
Fakultas	:	Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi	:	Pengembangan Masyarakat Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-1762/In.39/FUAD.03/PP.00.9/2023
Tanggal Kelulusan	:	16 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Nurhikmah, M. Sos. I.	(Ketua)	
A. Nurul Mutmainnah, M. Si.	(Sekretaris)	
Afidatul Asmar, S. Sos., M. Sos.	(Anggota)	
Selvy Anggriani Syarif, M. Si.	(Anggota)	

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare.”

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.
2. Dr. A. Nurkidam, M. Hum. Selaku dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdian beliau serta arahan yang diberikan mampu menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Nurhikmah, M. Sos. I. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan mendidik penulis dalam penulisan skripsi.
4. A. Nurul Mutmainnah, M. Si. Selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan dan mendidik penulis dalam penulisan skripsi.
5. Afidatul Asmar, S. Sos., M. Sos. Selaku dosen penguji 1 dan Selvy Anggraini Syarif, M. Si. Selaku penguji 2, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran dalam penulisan skripsi penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan penulisan skripsi.

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota (DP3A) Kota Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan kerja sama dari semua pihak yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt. Senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Parepare, 13 November 2024

11 Jumadil Awal 1446 H

Penulis,

*Nita*

Nita Rahmayanti

NIM 2020203870231016



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Nama : Nita Rahmayanti  
NIM : 2020203870231016  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 25 Juni 2000  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sepenuhnya kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 November 2024

18 Jumadil Awal 1446 H

Penyusun,

  
Nita Rahmayanti

NIM 2020203870231016

## ABSTRAK

Nita Rahmayanti. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare* (dibimbing oleh Dr. Nurhikmah, M. Sos. I dan A. Nurul Mutmainnah, M. Si)

Partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kota Parepare masih belum optimal, khususnya di bidang sosial ekonomi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare memiliki peran penting dalam upaya memberdayakan kaum perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengetahui dampaknya terhadap partisipasi perempuan.

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Proses pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dan perempuan penerima manfaat. Analisis data menggunakan pendekatan model interaktif Miles dan Huberman.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare memiliki peran krusial dalam meningkatkan partisipasi perempuan terutama melalui peran fasilitatif dan edukasi. Berbagai faktor pendukung seperti keyakinan diri, solidaritas sosial, tanggung jawab dan kemauan berpartisipasi meningkatkan keterlibatan perempuan. Namun, masih terdapat tantangan terkait keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Dampak program pemberdayaan juga bervariasi, dimana Sebagian besar perempuan mengalami peningkatan kemampuan dan kemauan berpartisipasi, meskipun masih ada yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perlu adanya kebijakan yang lebih responsive dari pemerintah untuk mendukung perempuan dalam akses terhadap sumber daya dan pelatihan, serta membangun kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

**Kata Kunci : Peran DP3A, Partisipasi Sosial Ekonomi, Perempuan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori .....	13
1. Teori Peran .....	13
2. Teori Partisipasi .....	16
C. Kerangka Konseptual .....	22
D. Kerangka Pikir .....	33

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Fokus Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
F. Uji Keabsahan Data .....	41
G. Teknik Analisis Data .....	42

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare .....	44
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare .....	60
3. Minimnya Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan Setelah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Parepare .....	75

#### B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare .....	84
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare .....	88

3. Minimnya Partisipasi sosial ekonomi perempuan setelah pemberdayaan perempuan di Kota Parepare .....	90
--	----

## BAB V PENUTUP

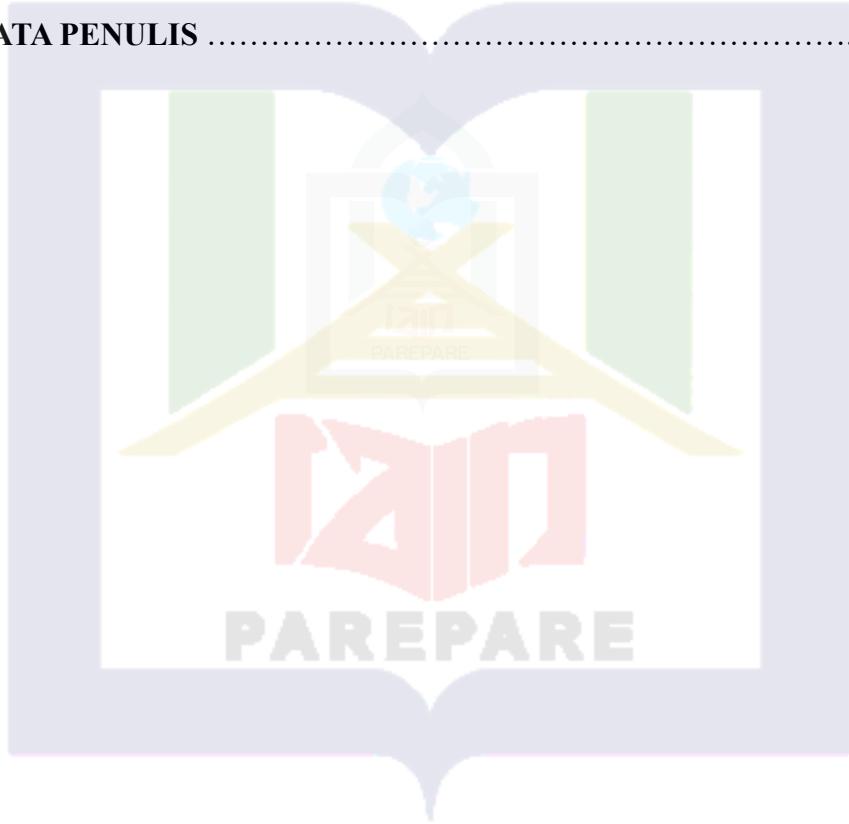
A. Kesimpulan .....	95
---------------------	----

B. Saran .....	96
----------------	----

## DAFTAR PUSTAKA .....

## LAMPIRAN .....

## BIODATA PENULIS .....



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Kerangka Pikir	34
4. 1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare	51



**DAFTAR LAMPIRAN**

Nomor Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	II
2	Turnitin	VII
3	Surat Rekomendasi Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara	IX
5	Surat Penetapan Pembimbing	XIII
6	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	XIV
7	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XV
8	Dokumentasi Wawancara	XVI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi perempuan dalam pembangunan mencakup hak dan tanggung jawab untuk berperan di berbagai tingkatan dalam proses pembangunan. Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari kemajuan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya dan juga meliputi pertahanan serta kemanan, baik di tingkat keluarga dan masyarakat<sup>1</sup>. Keterbatasan akses yang dialami oleh kaum perempuan terhadap pelatihan keterampilan telah mengakibatkan mereka sulit untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Maka dari itu, pemberdayaan perempuan menjadi upaya perubahan sosial dalam mengatasi ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya dan manfaat.

Meningkatkan kualitas hidup perempuan bertujuan untuk mencapai perempuan yang mandiri, berdaya, berpengetahuan dan memiliki keterampilan di semua aspek, termasuk fisik, sosial dan ekonomi, serta kemampuan untuk menyuarakan aspirasi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial<sup>2</sup>. Pemberdayaan tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan masih belum optimal di bidang sosial dan ekonomi, perempuan Indonesia masih dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang rentan<sup>3</sup>.

Partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif tidak hanya dapat meningkatkan penghasilan mereka, melainkan juga akan membantu mengurangi

---

<sup>1</sup> Margaretha Rumbekwan and Nini Adelina Tanamal, "Peran Perempuan Dalam Ketahanan Nasional," Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 48, no. 2 (February 2, 2023): <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.3081>, h. 209.

<sup>2</sup> Emi Dewi Susanti, Nalom Siagian, and Hisar Siregar, "Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Di Kabupaten Nias Selatan," JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik 3, no. 1 (2023): 106–22, <https://doi.org/10.51622>, h. 116.

<sup>3</sup> Syahdara Anisa Makruf and Fuad Hasyim, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi Di Era Digital," JUKESHUM 2, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v2i1.175>, h. 46.

tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah<sup>4</sup>. Namun, masih terdapat tantangan dan kesenjangan yang harus diatasi untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah, organisasi, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip kebijakan bernegara bahwa partisipasi dalam proses pembangunan merupakan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki. Partisipasi perempuan dapat dilihat melalui pemikiran dan tindakan yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi<sup>5</sup>.

Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sangat berpengaruh pada peningkatan partisipasi perempuan di kehidupan sosial, akan tetapi kontribusi yang bisa mereka berikan masih belum mendapatkan perhatian yang layak<sup>6</sup>. Kaum perempuan dihadapkan pada tantangan peran ganda, yang mencakup peran domestik dan peran publik. Peran domestik perempuan berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan di dalam rumah tangga, sementara peran publik ditentukan oleh partisipasi dalam berbagai bidang seperti, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, dan pendidikan untuk mendukung perubahan di masyarakat<sup>7</sup>. Salah satu hal yang krusial dalam memberdayakan perempuan adalah sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses

<sup>4</sup> Khairul Amri et al., “Kontribusi Pendapatan Perempuan Menurunkan Tingkat Kemiskinan Bukti Data Panel Di Provinsi Riau,” Selodang Mayang 9, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.351>, h. 202.

<sup>5</sup> M Hery Amrizal, Darsono Wisadirana, and Sanggar Kanto, “Partisipasi Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan),” Pamator 9, no. 2 (2016): <https://doi.org/10.21107/pamator.v9i2.3373>, h. 98.

<sup>6</sup> Topu Choudhury and Juti Rani Devi, “Empowerment of Women Through Urban Local Governance With Special Reference to Guwahati Municipal Corporation, Assam,” Journal of Positive School Psychology 6, no. 2 (2022): <http://jurnalppw.com>, h. 4237.

<sup>7</sup> Nalis Siti Khaerani, “Peran Wanita Dalam Perubahan Sosial Melalui Kepemimpinan Posdaya,” SOSIET Sosietas 7, no. 1 (2017), h. 371.

pengambilan keputusan di lingkungan rumah tangga, komunitas dan juga di dalam pemerintahan<sup>8</sup>.

Sebagai anggota masyarakat, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang harus dimanfaatkan, sebagaimana diwahyukan dalam Al-Qur'an oleh Allah Swt.:

﴿وَلَا تَشْمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾

﴿مِمَّا أَكْتَسَبُنَّ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۚ ۳۲﴾

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu (QS. An-Nisa : 32)”.

Surah An-Nisa ayat 32 terdapat pembahasan tentang prinsip kesetaraan , keadilan sosial dan ekonomi, serta sikap yang harus dimiliki terhadap karunia dari Allah Swt. Ayat ini menyatakan bahwa Allah Swt. Memberikan berbagai karunia kepada manusia agar dapat memahami dan menerima keberagaman dalam kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu, ayat ini menekankan bahwa baik perempuan dan laki-laki akan mendapatkan bagian sesuai upaya yang dilakukannya. Dengan menyatakan bahwa setiap orang akan mendapat bagian dari usahanya, ayat ini mendorong setiap individu untuk berusaha dan menekankan bahwa setiap orang akan mendapatkan hasil

---

<sup>8</sup> Arambam Sophia, “Women’s Empowerment in Manipur,” The Asian Institute Of Research Journal Of Social and Political Sciences 4, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.247>, h. 17.

sesuai usahanya, mendorong tanggung jawab pribadi dan etos kerja dan memotivasi untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan<sup>9</sup>.

Peningkatan status sosial ekonomi perempuan merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan sosial ekonomi yang komprehensif yang memprioritaskan pertumbuhan dan kesejahteraan perempuan, sekaligus menanamkan pemahaman bahwa perempuan memiliki potensi untuk menjadi individu yang tangguh. Buvinic dan O'Donnell menyatakan bahwa meskipun semakin banyak penelitian yang menyelidiki dampak pemberdayaan ini, hanya sedikit penelitian yang menyelidiki untuk memahami siapa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ini dan strategi apa yang secara efektif meningkatkan partisipasi. Meningkatkan keterlibatan partisipasi perempuan dalam perekonomian bukanlah jaminan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan terutama di negara-negara berpenghasilan rendah yang rentan secara sosial dan ekonomi<sup>10</sup>.

Partisipasi sosial ekonomi perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian kesetaraan gender di suatu daerah. Partisipasi sosial ekonomi perempuan dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, proses pengambilan keputusan dan kemampuan untuk mengakses sumber daya yang mendukung produktivitas. Namun, masih terdapat tantangan terkait rendahnya partisipasi sosial ekonomi perempuan diberbagai daerah, termasuk di Kota Parepare. Menurut statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Kota Parepare memiliki total penduduk sebanyak 160.309 jiwa pada Tahun 2023, terdiri dari 79.753 jiwa laki-laki dan 80.556 jiwa perempuan<sup>11</sup>. Kondisi jumlah penduduk perempuan di Kota Parepare sedikit lebih banyak daripada laki-laki, yaitu 80.556 jiwa dibandingkan 79.753 jiwa, hal ini menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan yang harus

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 158.

<sup>10</sup> Kate Ambler, Kelly Jones, and Michael O'Sullivan, "Facilitating Women's Access To An Economic Empowerment Initiative : Evidence From Uganda," World Development 138 (February 1, 2021), <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105224>, h. 1.

<sup>11</sup> BPS, Kota Parepare Dalam Angka 2024 (Parepare: Badan Pusat Statistik, 2024), h. 46.

diberdayakan secara optimal agar bisa memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri, masyarakat dan dalam proses pembangunan di berbagai bidang di Kota Parepare.

Di sisi lain, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Kota Parepare masih tergolong rendah menunjukkan bahwa akses ekonomi produktif terbatas untuk menciptakan kesempatan kerja baru yang sesuai dengan keterampilan para kaum perempuan. Berdasarkan data dari Sakernas 2023, diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Parepare mencapai 65,52%. Terlihat dalam data menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih rendah berada di angka 51,44%, dibandingkan laki-laki menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, yaitu 80,09%<sup>12</sup>. Hal ini menandakan bahwa perempuan di Kota Parepare menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam mengakses lapangan pekerjaan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif juga masih terbatas. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi sosial ekonomi perempuan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kontrol atas sumber daya dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif. Dari data tersebut menunjukkan pentingnya program-program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan partisipasi sosial ekonomi mereka.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare adalah instansi pemerintahan yang dibentuk secara khusus untuk memfasilitasi dan menangani isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Parepare yang berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam upaya memberdayakan kaum perempuan. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2015 mengatur Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, program dan kegiatan

<sup>12</sup> BPS, Statistik Ketenagakerjaan Kota Parepare 2023 (Parepare: Badan Pusat Statistik, 2024), h. 22.

pembangunan memberikan manfaat bagi perempuan dalam mengatasi kesenjangan gender.<sup>13</sup>.

Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan agar meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare yang dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dalam meningkatkan kemandirian sosial ekonomi perempuan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan inklusif di Kota Parepare. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang skripsi dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare.
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan di Kota Parepare ?
3. Bagaimana partisipasi sosial ekonomi perempuan setelah pemberdayaan perempuan di Kota Parepare ?

---

<sup>13</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, “Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2024-2026,” 2023, h. 13.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meningkatkan partisipasi social ekonomi perempuan di Kota Parepare.
3. Mengetahui partisipasi sosial ekonomi perempuan setelah pemberdayaan perempuan di Kota Parepare.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan teori dan konsep tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dalam memberdayakan perempuan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan dan memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pemberdayaan perempuan dan partisipasi perempuan di berbagai konteks.

#### b. Kegunaan Praktis

Menjadi dasar pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang lebih konkret terkait pemberdayaan perempuan di bidang sosial ekonomi, yang dapat mendorong

masyarakat untuk lebih menyadari pentingnya peran partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan bertujuan untuk menjelaskan letak perbedaan yang menguatkan antara hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Sehingga penelitian yang akan dilakukan memberikan penguatan atau dapat memperbaiki teori yang sudah ada<sup>14</sup>.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Emilia Nanda Sartika dan Ahmad Arif Widianto dengan judul “Perempuan Dalam Pemberdayaan Sosial di Komunitas Pelangi Nusantara Malang”<sup>15</sup>.

Penelitian ini membahas tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan di komunitas Pelangi Nusantara Malang melalui program pelatihan kewirausahaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi tantangan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan Komunitas Pelanusa. Komunitas Pelangi Nusantara (Pelanusa) adalah sebuah komunitas pemberdayaan perempuan bergerak di bidang kewirausahaan sosial untuk membantu para anggota binaannya memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan kewirausahaan sosial penjualan produk kerajinan dari bahan dasar limbah dari kain perca dapat diolah menjadi produk yang ramah terhadap lingkungan dalam mengurangi limbah kain dan kegiatan pendampingan pada program pelatihan membuat produk kerajinan dan juga diberikan pembekalan materi kewirausahaan (manajemen usaha, pengembangan produk, branding produk dan

---

<sup>14</sup> Nanang Abdul Jamal and Ahmad Wahyudi, Metodologi Penelitian (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), h. 14.

<sup>15</sup> Emilia Nanda Sartika and Ahmad Arif Widianto, “Perempuan Dalam Pemberdayaan Sosial Di Komunitas Pelangi Nusantara Malang,” Dimensia : Jurnal Kajian Sosiologi 12, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i2.61513>, h. 196-213.

digital marketing). Partisipasi perempuan dalam pemberdayaan yaitu berupa partisipasi tenaga, ide, dan materiil. Faktor yang menjadi pertimbangan keterlibatan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan Komunitas Pelanusa yaitu, dapat meningkatkan pendapatan, memperluas jaringan sosial, memperkuat posisi tawar dan meningkatkan pengembangan diri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan kurang maksimalnya fasilitas peminjaman msein jahit, rendahnya kemampuan dalam mengikuti ketentuan SOP produk, kurangnya dukungan keluarga dan kurang terorganisirnya keuangan. Persamaan penelitian adalah membahas tentang hambatan partisipasi aktif perempuan dalam program pemberdayaan perempuan. Perbedaannya adalah penelitian Emilia Nanda Sartika dan Ahmad Arif Widianto menggunakan teori pilihan rasional James S Coleman, sedangkan penelitian selanjutnya menerapkan teori peran yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurul Septya Rohma, Siti Marwiyah, Renny Candradewi Pusoitarini dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Batik Tulis Ronggo Mukti Pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo”<sup>16</sup>.

Penelitian ini membahas upaya pemberdayaan perempuan melalui partisipasi dalam kelompok batik. Program Kelompok Batik Tulis Ronggo Mukti berfokus pada pemberdayaan perempuan di Sidomukti dengan memberikan pelatihan keterampilan membatik dengan tujuan untuk mengubah pola pikir agar lebih mandiri dan giat dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan perempuan

---

<sup>16</sup> Ika Nurul Septya Rohma, Siti Marwiyah, and Renny Candradewi Pusoitarini, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Batik Tulis Ronggo Mukti Pada Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,” SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 9 (July 27, 2022): <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.211, h.1585-1594>.

terjadi melalui kelompok batik tulis Ronggo Mukti dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program pemberdayaan membatik melibatkan sosialisasi, proses produksi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Faktor Pendukung adalah kesadaran masyarakat dan ketersediaan alat sedangkan faktor penghambatnya adalah aktivitas lain yang dimiliki Ibu rumah tangga dan tantangan dari penjiplakan serta persaingan pasar. Persamaan penelitian ini adalah membahas upaya pemberdayaan perempuan, meskipun dengan tujuan yang berbeda. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada ibu rumah tangga yang menjadi anggota kelompok Batik Tulis Ronggo Mukti di Kelurahan Sidomukti, sedangkan penelitian selanjutnya akan difokuskan pada perempuan secara umum di wilayah kota Parepare.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Neni Miyayi, Hanantyo Sri Nugroho, Ferri Wicaksono dan Ardiyati dengan judul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan di Kabupaten Sleman”<sup>17</sup>,

Penelitian ini membahas tentang peluang dan ancaman DP3AP2KB Kabupaten Sleman termasuk dukungan dari berbagai organisasi dan tantangan terkait keterbatasan anggaran, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya kebijakan yang terarah dan tegas untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi diuraikan melalui empat strategi analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats), ini adalah aspek penting dalam mengembangkan strategi. Berdasarkan

---

<sup>17</sup> Endah Neni Miyayi et al., “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Di Kabupaten Sleman,” Jurnal Dinamika 3, no. 1 (2023): h. 52-62.

analisis SWOT, strategi yang dikembangkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Sleman belum terlaksana secara optimal karena ketidakmampuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari internal lembaga serta peluang dan ancaman dari eksternal lembaga. Persamaan penelitian ini adalah membahas keterlibatan instansi pemerintahan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menganalisis strategi yang diterapkan pada DP3AP2KB Kabupaten Sleman dengan menggunakan analisis SWOT dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan sedangkan penelitian selanjutnya meneliti tentang peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam aspek sosial ekonomi.

Penelitian tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan ketiga penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada peran instansi pemerintah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare. Penelitian sebelumnya berfokus pada upaya pemberdayaan perempuan melalui program-program tertentu, seperti penelitian Rohma dkk melalui kelompok batik tulis di Kelurahan Sidomukti, Kabupaten Probolinggo dan analisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Penelitian ini menggunakan teori peran Jim Ife dan Frank Tesoriero. Penggunaan teori ini, tidak hanya melihat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tetapi juga bagaimana peran tersebut berdampak pada partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program sosial ekonomi. Teori

yang digunakan oleh penelitian ini berbeda dengan pendekatan teori pilihan rasional James S Coleman dan analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Selain itu, cakupan demografis penelitian ini lebih luas, melibatkan kaum perempuan secara umum di Kota Parepare, tidak terbatas pada Ibu rumah tangga dan kelompok perempuan tertentu. Penelitian sekarang ini, dalam konteks kota secara keseluruhan, tidak terbatas pada komunitas atau kelompok tertentu seperti penelitian Sartika dan Widianto (Komunitas Pelangi Nusantara di Malang). Fokus penelitian pada peningkatan partisipasi sosial ekonomi perempuan juga memberikan perspektif yang lebih holistik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek kewirausahaan sosial, produksi batik dan strategi komunitas semata. Dengan demikian, penelitian sekarang akan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami upaya peningkatan partisipasi sosial ekonomi perempuan, khususnya di Kota Parepare.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Peran

Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari status yang melekat pada diri seseorang. Peran terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat dalam hal kedudukan (status), individu menjalankan peran Ketika melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya<sup>18</sup>. Dengan kata lain, peran adalah wujud nyata dari kedudukan seseorang dalam masyarakat. Seseorang yang berada pada posisi tertentu di masyarakat diharapkan melaksanakan peran yang sesuai dengan kedudukannya.

---

<sup>18</sup> Soekanto Soerjono, Teori Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: CV. Rajawali, 2002), h. 243.

Teori peran (*role theory*) yaitu istilah “peran” berasal dari dunia teater, di mana seorang actor diwajibkan untuk memerankan tokoh tertentu dan berperilaku sesuai dengan tuntutan karakter. Peran yang dimainkan oleh aktor dalam teater dianalogikan dengan status seseorang dalam masyarakat, sama seperti dalam teater di mana seorang actor memiliki peran yang berhubungan dengan karakter lain, kedudukan seseorang dalam masyarakat juga memengaruhi perilakunya.<sup>19</sup>.

Bruce J. Cohen menyatakan bahwa peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status. Seseorang yang dimaksud adalah individu yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial, di mana peran mereka menggambarkan perilaku yang mengikuti norma masyarakat<sup>20</sup>.

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu<sup>21</sup> :

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang dianjurkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan yang saling bertentangan satu sama lain.

<sup>19</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 215.

<sup>20</sup> Kinanti Resmi Hayati et al., “Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) 4, no. 1 (April 29, 2022): <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i1.457>, h. 12.

<sup>21</sup> Desmayeti, Junriana, and Dwi Aprita, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang Di Desa Batu Berapi Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas,” JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji) STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang 3, no. 1 (2021), h. 648.

- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasan yang bertentangan satu sama lain.

Dimensi peran adalah aspek yang mendasari dan menjelaskan kinerja peran seseorang dalam situasi tertentu. Dimensi ini membantu dalam memahami kompleksitas peran dan bagaimana peran tersebut diinterpretasikan dan dijalankan oleh individu. Menurut Arimbi dan Santosa, beberapa dimensi peran sebagai berikut<sup>22</sup> :

- 1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran adalah suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan
- 2. Peran sebagai strategi. Menurut perspektif ini, peran adalah strategi yang digunakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi. Dalam hal ini, peran digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan

---

<sup>22</sup> Maulida Eka Putri Sompie, Achmad Aminudin, and Jatmiko Yogopriyatno, “Analisi Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sungai Serut,” *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)* 1, no. 3 (2022), h. 95.

keputusan. Persepsi ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah dirancang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pendapat dan preferensi dari masyarakat menjadi pertimbangan penting saat membuat keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran digunakan untuk mengurangi atau meredam konflik dengan mencoba mencapai kesepakatan tentang sudut pandang. Persepsi ini didasarkan pada asumsi bahwa bertukar pikiran dan pandangan antar individu dapat menumbuhkan pengertian, toleransi dan untuk memahami sekaligus mengurangi ketidakpastian.
5. Peran sebagai terapi. Pandangan ini menyatakan bahwa peran dilakukan untuk membantu masyarakat dengan masalah psikologis, seperti keputusasaan, ketidakberdayaan dan persepsi bahwa diri mereka bukan komponen yang berharga dalam masyarakat.

## 2. Teori Partisipasi

### a. Pengertian Partisipasi

Secara etimologis, istilah partisipasi diambil dari kata “*part*” dalam Bahasa Inggris, yang berarti. Ketika kata “*part*” diubah menjadi kata kerja, maka menjadi “*to participate*” yang menunjukkan tindakan berpartisipasi”<sup>23</sup>. Mardikanto mendefinisikan partisipasi berarti keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengambil bagian sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat. Menurut Slamet, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan serta berkontribusi dalam memanfaatkan dan menikmati hasil yang diperoleh. Menurut Karsidi, partisipasi masyarakat berarti keikutsertaan sukarela baik

---

<sup>23</sup> Damsar, Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 177.

langsung maupun tidak langsung dalam semua tahap kegiatan pembangunan serta keterlibatan yang terorganisir oleh berbagai lapisan masyarakat<sup>24</sup>.

Mubyarto dan Sartono Kartodirjo mendeskripsikan partisipasi yaitu memberikan kontribusi untuk keberhasilan suatu program tanpa harus mengorbankan kepentingan pribadi. Sedangkan Moelyarto Tjokro Winoto, bahwa partisipasi sebagai pernyataan dan tenaga individu dalam lingkungan kelompok yang memungkinkan orang mengembangkan pemikiran dan perasaan untuk mencapai tujuan bersama dan bertanggung jawab atas tujuan tertentu. Pandangan Loekman Soetrisno, partisipasi merupakan kesediaan masyarakat untuk mendukung program yang ditetapkan oleh pemerintah<sup>25</sup>.

Hoof Steede mendefinisikan partisipasi sebagai tindakan mengambil bagian dalam satu atau lebih tahap dalam proses pembangunan. Keith Davis mendefenisikan partisipsi sebagai keterlibatan pikiran, moral dan perasaan dalam kelompok yang mengajak individu untuk berpartisipasi pada keberhasilan kelompok dan bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan. Sementara itu, Verhangen mengartikan partisipasi sebagai segala jenis keikutsertaan individua tau anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu<sup>26</sup>.

Hikmat menjelaskan bahwa partisipasi adalah aspek krusial dalam kemandirian dan pemberdayaan, di mana keterlibatan masyarakat membantu mereka memperoleh kepercayaan diri dan mengembangkan keterampilan baru. Melalui pemberdayaan dan partisipasi, strategi ini dapat mendorong perubahan

<sup>24</sup> Triman Tapi et al., Pembangunan Desa (Yayasan Kita Menulis, 2024), h. 107.

<sup>25</sup> Ridwan, Perencanaan Partisipatif (Perspektif Kesejahteraan Masyarakat) (Jawa Timur: CV. R.A.De.Rozarie, 2013), h. 47.

<sup>26</sup> Suaib, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), h. 59-60.

sosial, ekonomi dan tarsnformasi budaya yang pada akhirnya akan menghasilkan pembangunan yang lebih berorientasi pada masyarakat<sup>27</sup>.

### **b. Tipologi Partisipasi Masyarakat**

Tipologi partisipasi masyarakat menggambarkan pada berbagai bentuk dan tingkatan keterlibatan dalam tahap pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan. Tipologi ini menjelaskan keterlibatan masyarakat dan kualitas partisipasi yang terjadi, tipologi ini bukan hanya menggambarkan tingkatan, tetapi juga perlunya memperhatikan upaya untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat menuju ke arah yang lebih bermakna dan memberdayakan, jenis-jenis tipologi partisipasi masyarakat, meliputi<sup>28</sup> :

#### **1. *Passive Participation***

Masyarakat berpartisipasi karena mereka harus terlibat pada tahap pembangunan, meskipun tanpa kemampuan untuk mengubahnya.

#### **2. *Participation in Information Giving***

Partisipasi masyarakat hanya sebatas memberikan informasi yang diminta oleh perencana pembangunan dengan memberikan jawaban atas pertanyaan, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menilai keakuratan hasil penelitian.

#### **3. *Participation by Consultation***

Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk konsultasi dengan melibatkan pihak luar yang bertugas mendengar dan mengidentifikasi masalah serta merumuskan solusinya. Dalam proses ini, tidak ada pembagian keputusan, karena semua tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pihak luar yang telah diberi mandat.

---

<sup>27</sup> Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (Makassar: De La Macca, 2018), h. 165-166.

<sup>28</sup> Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (Makassar: De La Macca, 2018), h. 153.

#### **4. *Participation for Material Incentives***

Partisipasi ini melibatkan masyarakat yang menyumbangkan sumber daya yang mereka miliki, seperti tenaga kerja dan lahan, sebagai imbalannya, mereka menerima berupa makanan, uang atau bentuk materi lainnya.

#### **5. *Functional Participation***

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pembentukan kelompok atau kepanitan yang didukung oleh pihak luar.

#### **6. *Interactive Participation***

Proses analisis dan perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat dengan pembentukan kelompok yang bekerja sama dengan Lembaga donor untuk mengatasi dan memutuskan berbagai isu yang muncul di tingkat lokal.

#### **7. *Self-Mobilization***

Masyarakat secara mandiri mengambil inisiatif melaksanakan pembangunan tanpa intervensi dari pihak luar, yang hanya berfungsi membantu dalam merancang kerangka kerja. Masyarakat memiliki kendali atas sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan.

#### **8. *Catalysing Change***

Agen perubahan dibentuk dalam masyarakat melalui partisipasi, bertujuan untuk mengajak dan memengaruhi masyarakat sekitar agar berperan aktif dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan.

#### **9. *Optimum Participation***

Memfokuskan pada konteks dan tujuan pembangunan agar dapat menentukan tipe partisipasi yang tepat untuk mencapai partisipasi yang optimal, penting untuk mempertimbangkan siapa yang dapat ikut berpartisipasi. Dengan cara ini, dapat menemukan strategi yang efektif untuk proses pembangunan.

## ***10. Manipulation***

Partisipasi masyarakat sering kali tanpa memiliki kekuasaan yang konkret, sehingga membentuk kelompok atau kepanitiaan. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan yang berarti untuk memengaruhi arah pembangunan.

### **c. Bentuk-Bentuk Partisipasi**

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat bervariasi tergantung pada konteks, tujuan dan tingkat keterlibatan yang diinginkan. Partisipasi yang efektif biasanya melibatkan kombinasi dari berbagai bentuk, disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat serta tujuan program kegiatan atau kebijakan yang diinginkan. Dengan menentukan bentuk partisipasi yang tepat, keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan dan memperoleh berbagai manfaat sekaligus membentuk lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dan menyediakan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan.

Konsep partisipasi mencakup aspek yang berkaitan dengan kontribusi atau sumbangan. Dalam konteks ini, partisipasi terhadap kegiatan pembangunan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti<sup>29</sup> :

1. Partisipasi melalui pikiran.
2. Partisipasi melalui tenaga.
3. Partisipasi yang melibatkan pikiran dan tenaga.
4. Partisipasi berdasarkan keahlian.
5. Partisipasi dengan kontribusi barang.
6. Partisipasi dengan sumbangan uang.
7. Partisipasi dengan memberikan jasa.

---

<sup>29</sup> Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (Makassar: De La Macca, 2018), h. 158.

Menurut Mardikanto, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan dengan cara yang beragam<sup>30</sup> :

1. Bergabung sebagai anggota dalam kelompok masyarakat.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok.
3. Terlibat dalam kegiatan organisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat lainnya.
4. Mengoptimalkan sumber daya yang ada di masyarakat.
5. Ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil yang diperoleh dari kegiatan masyarakat.

#### **d. Tahapan Partisipasi**

Cohen dan Uphoff (1980) mengemukakan bahwa ada berbagai tahapan partisipasi dalam sebuah program<sup>31</sup>:

##### **1. *Participation in Decision Making* (Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan)**

Partisipasi ini berfokus pada menghasilkan ide, merumuskan dan mengevaluasi pilihan dan membuat keputusan terkait kemungkinan-kemungkinan tersebut, termasuk membuat rencana melaksanakan pilihan yang dipilih.

##### **2. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam Pelaksanaan)**

Partisipasi masyarakat dalam kontribusi sumber daya dapat berupa tenaga kerja, uang, barang berwujud, dan informasi. Untuk proyek-proyek yang bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya lokal ke dalam inisiatif pembangunan, setiap masukan ini sangat penting.

##### **3. *Participation in Benefit* (Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat)**

---

<sup>30</sup> Nuraisah and Lilis Wahyuni, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Di Kampung Rawa Mekar Jaya,” Share : Social Work Journal 10, no. 1 (August 9, 2020): 73–82, <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>, h. 76.

<sup>31</sup> John Cohen and Norman Uphoff, “Participation’s Place in Rural Development : Seeking Clarity Through Specificity,” *World Development* 8, no. 3 (1980).

Partisipasi masyarakat dalam suatu proyek dapat menghasilkan setidaknya tiga jenis manfaat yang mungkin : (1) material; (2) sosial; dan (3) pribadi.

#### **4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam Evaluasi)**

Partisipasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam evaluasi yang berfokus pada proyek tertentu. Jika ada proses peninjauan formal, orang akan tertarik untuk mengetahui siapa yang terlibat, seberapa keberlanjutan partisipasi tersebut dan kekuatan apa yang ada untuk menindaklanjuti saran yang diberikan.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **a. Partisipasi Sosial Perempuan**

Partisipasi sosial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan sosial di masyarakat. Partisipasi sosial dalam masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti keikutsertaan dalam kegiatan sosial budaya, organisasi masyarakat dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur dan menilai tingkat keterlibatan dan keaktifan perempuan dalam kehidupan sosial adalah melalui partisipasi sosial.

Partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial melibatkan aspek Pendidikan dan pemberdayaan. Kaum perempuan sering menjadi agen perubahan yang mendorong kesadaran akan pentingnya Pendidikan dan kemandirian ekonomi. Keterlibatan dalam kegiatan sosial tidak hanya memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, tetapi juga membangun jaringan sosial dan dukungan dari orang lain. Perempuan yang berpartisipasi dalam organisasi masyarakat juga mendapatkan manfaat psikologis, seperti rasa percaya diri

yang lebih tinggi dan kepuasan diri dengan merasa dihargai, mereka termotivasi untuk terus berkontribusi secara aktif.<sup>32</sup>.

### **b. Partisipasi Ekonomi Perempuan**

Partisipasi ekonomi perempuan mengacu pada keterlibatan perempuan di sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian. Partisipasi ekonomi dapat berupa keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja, kepemilikan aset dan pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. Partisipasi ekonomi merupakan indikator utama pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Tingkat partisipasi perempuan dalam berwirausaha secara signifikan memengaruhi status sosial ekonomi keluarga dan berperan dalam memperkuat perekonomian keluarga<sup>33</sup>.

### **c. Upaya Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan**

Teori peran yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016)<sup>34</sup> berfokus pada pengembangan kemampuan masyarakat untuk mengorganisir dan memastikan upaya yang diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, teori ini terbagi menjadi empat komponen :

#### **1. *Fasilitative Roles (Peran Fasilitatif)***

Peran fasilitatif merupakan peran yang berfokus untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui, menghargai kontribusi individu, kelompok dan masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas. Pengembangan potensi individu dan kelompok juga melibatkan pencapaian kesepakatan

<sup>32</sup> Adinda Dilla Ayuningtyas Purba and Neila Susanti, “Analisis Peran Ganda Perempuan Generasi Sandwich Pada Ruang Publik Dan Domestik Di Kabupaten Batubara,” JISA : Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama 7, no. 1 (2024), h. 156-157.

<sup>33</sup> Marisa Susanty, Sri Rahayu, and Maya Insani, “Pengaruh Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Berwirausaha Terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir),” SAMALEWA : Jurnal Riset Dan Kajian Manajemen 2, no. 1 (2022), h. 75.

<sup>34</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.558.

Kerjasama dengan pihak lain. Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, terdapat tujuh peran spesifik dalam peran fasilitatif :

### **1) Animasi Sosial (Semangat Sosial)**

Istilah semangat sosial mengacu pada aspek penting dalam praktik komunitas yaitu kemampuan untuk menginspirasi, mengantisipasi, mengaktifkan, menstimulasi dan menginspirasi orang lain untuk berpartisipasi dalam suatu tindakan<sup>35</sup>.

### **2) Mediasi dan Negosiasi**

Konflik kepentingan dan konflik nilai adalah hal umum terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat atau program lainnya. Ketika konflik muncul, peran mediator diperlukan untuk menyelesaikan isu tersebut, karena tugas utama peran ini adalah sebagai penengah dalam situasi konflik<sup>36</sup>.

### **3) Pendukung**

Peran pendukung dapat dilakukan dengan memberikan dukungan atau bantuan agar individu atau kelompok dapat bangkit. Banyak kesulitan dalam masyarakat muncul ketika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kemampuannya<sup>37</sup>.

### **4) Membangun Konsensus**

Pembangunan konsensus (kesepakatan) merupakan pengembangan dari peran mediasi. Tujuan konsensus adalah untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik dengan mengganti nilai-nilai yang saling bertentangan dan struktur kompetisi dengan

<sup>35</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.559.

<sup>36</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.563.

<sup>37</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.566.

kesepakan dan kerja sama, sehingga semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak<sup>38</sup>.

### **5) Fasilitasi Kelompok**

Peran seorang pekerja masyarakat untuk memfasilitasi kelompok-kelompok berbeda sangat dipengaruhi pada tingkat keberhasilan kemampuannya untuk beroperasi secara efektif dalam kelompok kecil. Dalam konteks kelompok yang berbeda, pekerja masyarakat akan terlibat dalam berbagai aktivitas kelompok termasuk struktur organisasi, perencanaan, pembagian tugas, dukungan mandiri kelompok serta berbagai bentuk pengambilan keputusan<sup>39</sup>.

### **6) Pemanfaatan Sumber Daya**

Individu yang berperan sebagai agen perubahan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat dan daerah sekitarnya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dengan mengenali dan memanfaatkan sumber daya yang ada, agen perubahan dapat mendukung pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat<sup>40</sup>.

### **7) Mengorganisasi**

Peran organisasi adalah untuk mengkoordinasikan dan menyertakan kemampuan para pelaku untuk memikirkan apa yang dibutuhkan dalam rangka melakukan perubahan, bagi pelaku

<sup>38</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 567.

<sup>39</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.570.

<sup>40</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 574.

perubahan harus mampu melaksanakan tugas dan memprioritaskan tugas mereka sendiri<sup>41</sup>.

## 2. *Educational Roles (Peran Edukasi)*

Peran pendidikan atau edukasi bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Proses Pembelajaran dalam pemberdayaan masyarakat terus berlangsung untuk mengembangkan ide. Peningkatan produktivitas membantu meningkatkan keterampilan dan pengalaman. Edukasi dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran, pemberian informasi dan pelatihan praktis. Berikut adalah penjelasan mengenai peran edukasi<sup>42</sup> :

### 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Upaya peningkatan kesadaran memungkinkan individu untuk memahami isu dari perspektif yang lebih luas. Dalam situasi ini, fokusnya adalah menyadarkan perempuan akan pentingnya pengetahuan untuk mendorong perubahan sosial ekonomi dan meningkatkan partisipasi mereka<sup>43</sup>.

### 2) Memberikan Informasi

Memberikan informasi yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat, pekerja masyarakat memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi mengenai program-program yang tersedia dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 576.

<sup>42</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 580.

<sup>43</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 583.

<sup>44</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 585.

### 3) Pelatihan

Pelatihan memiliki peran edukatif yang sangat khusus karena melibatkan proses pengajaran kepada individu agar dapat melakukan sesuatu yang menghasilkan sebuah karya. Pekerja masyarakat tidak selalu berperan sebagai pelatih, melainkan berkontribusi dalam membentuk kelompok untuk mencari orang yang dapat memberikan pelatihan yang dibutuhkan<sup>45</sup>.

## 3. *Representational Roles (Peran Representasi)*

Peran representasi adalah peran yang memerlukan kemampuan berpikir dari masyarakat. Dalam peran ini, Lembaga, kelompok atau individu yang melakukan pemberdayaan berinteraksi dengan pihak lain untuk memenuhi kepentingan individu dan kelompok. Peran ini dapat diwujudkan dengan mengumpulkan sumber, melakukan advokasi serta memanfaatkan media dan jaringan kerja<sup>46</sup>.

### 1) Memperoleh Berbagai Sumber Daya

Sumber yang harus diperoleh meliputi pendanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, lembaga-lembaga yang terhubung dan sumber-sumber lainnya yang diperlukan. Sumber eksternal diperlukan untuk mendukung sistem sumber daya yang dihasilkan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>47</sup>.

### 2) Advokasi

Advokasi berfungsi untuk melindungi kepentingan orang-orang yang menghadapi masalah hukum, serta masyarakat yang tertindas dan

<sup>45</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 590.

<sup>46</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 591.

<sup>47</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 592.

termarjinalkan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dapat terpenuhi<sup>48</sup>.

### **3) Memanfaatkan Media Massa**

Media massa sebagai alay yang efektif untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Media ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, berita atau mempromosikan produk melalui berbagai saluran, termasuk cetak, elektronik dan internet<sup>49</sup>.

### **4) Jaringan Kerja**

Jaringan kerja dibangun dengan cara melibatkan penciptaan relasi dengan individu dari berbagai pihak dan mendorong partisipasi mereka dalam upaya pemberdayaan<sup>50</sup>.

### **5) Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman**

Peran pekerja masyarakat perlu berbagi pengalaman dengan sesama dan orang lain yang didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat memiliki potensi dan pengetahuan. Pekerja masyarakat dapat mempelajari banyak hal dari potensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat<sup>51</sup>.

## **4. Technical Roles (Peran Teknis)**

Peran teknis adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam organisasi untuk melaksanakan berbagai tugas, seperti mengumpulkan data, menganalisis informasi, menggunakan komputer dan

<sup>48</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 595.

<sup>49</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 597.

<sup>50</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 600.

<sup>51</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 602.

menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pembinaan. Keterampilan teknis ini diperlukan untuk mendukung proses pemberdayaan<sup>52</sup>.

### **1) Pengumpulan dan Analisis Data**

Peran penelitian dalam pengumpulan dan analisis data melibatkan penggunaan berbagai metodologi yang relevan. Pengumpulan data dirancang untuk mengidentifikasi isu dan kebutuhan masyarakat yang memungkinkan analisis data yang lebih rinci<sup>53</sup>.

### **2) Menggunakan Komputer**

Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan menggunakan komputer yang selalu dibutuhkan untuk mengolah data dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada didalamnya. Penggunaan komputer sangat berguna untuk menunjang kegiatan terkait dengan proses pemberdayaan<sup>54</sup>.

### **3) Presentasi Verbal dan Tertulis**

Kemampuan menyampaikan presentasi sangat penting dalam mengkomunikasikan ide dan konsep kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Presentasi dapat dilakukan secara lisan dan juga dalam bentuk laporan tertulis yang efektif dan komunikatif<sup>55</sup>.

### **4) Mengontrol dan Mengelola Keuangan**

Pekerja masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu dalam pencatatan finansial, memastikan pengawasan terhadap

---

<sup>52</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 603.

<sup>53</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 604.

<sup>54</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 608.

<sup>55</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 609.

pertanggung kawaban pengeluaran serta mengawasi anggaran dan pengawasan finansial lainnya<sup>56</sup>.

#### **d. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Pada dasarnya, upaya untuk mewujudkan partisipasi bertujuan untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan bersedia berpartisipasi secara aktif dalam setiap program dan kegiatan yang mendukung partisipasi. Tentunya, ada berbagai faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat partisipasi setiap individu.

Menurut pandangan Holil, terdapat unsur dasar partisipasi sosial yang berpengaruh terhadap partisipasi<sup>57</sup> :

- a. Keyakinan diri yang dimiliki oleh anggota masyarakat.
- b. Solidaritas dan integritas sosial dalam kelompok masyarakat.
- c. Komitmen dan tanggung jawab sosial dari anggota masyarakat.
- d. Kemauan dan kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan serta membangun kekuatan dari dalam diri sendiri.
- e. Prakarsa individu yang diterima dan dianggap sebagai bagian dari masyarakat.
- f. Kepentingan umum.
- g. Struktur Organisasi, keputusan yang rasional dan efisiensi dalam usaha.
- h. Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses pengambilan keputusan.
- i. Kepekaan dan tanggapan masyarakat terhadap isu, kebutuhan dan kepentingan umum yang ada.

---

<sup>56</sup> Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 613.

<sup>57</sup> Holil Soelaiman, *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, 1980). h. 9-10.

Santoso Sastropoetro menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, antara lain<sup>58</sup> :

- a. Tingkat pendidikan, kemampuan literasi, kemiskinan. Status sosial dan keyakinan diri.
- b. Pemahaman yang dangkal tentang ajaran agama.
- c. Ada kecenderungan untuk menginterpretasikan secara salah tujuan, motivasi dan kepentingan organisasi yang sering kali menghasilkan perepsi yang keliru mengenai keinginan dan motivasi masyarakat.
- d. Tersedianya peluang kerja yang lebih baik di luar daerah pedesaan.
- e. Tidak adanya kesempatan untuk terlibat dalam program-program pembangunan.

Margono Slamet, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh 3 unsur pokok<sup>59</sup> :

#### **a. Kesempatan Untuk Berpartisipasi**

Pada kenyataannya, banyak program pembangunan yang tidak mendapatkan partisipasi disebabkan oleh tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta. Selain itu, sering kali informasi tentang kapan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi tidak disampaikan kepada masyarakat.

Ada berbagai kesempatan yang dimaksudkan, diantaranya adalah :

- a. Kemauan politik dari pihak berwenang untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pemeliharaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan.
- b. Tersedianya kesempatan untuk memperoleh informasi dan menggunakan teknologi tepat guna, termasuk peralatan pendukung.

---

<sup>58</sup> Zaini Rohmad, *Sosiologi Pembangunan* (Yogyakarta: Ombak, 2016). h. 136.

<sup>59</sup> Aprilia Theresia et al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 207.

- c. Terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya, bai kalam maupun manusia dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi yang tepat, beserta alat dan perlengkapannya.
- e. Adanya kesempatan bagi masyarakat berorganisasi, termasuk untuk memperoleh peraturan, perizinan serta prosedur kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi.

**b. Kemampuan Untuk Berpartisipasi**

Kesempatan yang tersedia atau dikembangkan untuk mendorong partisipasi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika masyarakat tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk berpartisipasi. Kemampuan yang dimaksud meliputi<sup>60</sup> :

- a. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami kesempatan untuk memperbaiki atau membnagun kualitas hidupnya.
- b. Kemampuan dalam melaksanakan pembangunan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu.
- c. Kemampuan untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan sumber daya dan kesempatan yang ada secara optimal.

**c. Kemauan Untuk Berpartisipasi**

Faktor utama yang memengaruhi kemauan untuk berpartisipasi adalah sikap masyarakat dalam upaya membangun dan memperbaiki kehidupan mereka, yang berkaitan dengan<sup>61</sup> :

---

<sup>60</sup> Aprilia Theresia et al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 209.

<sup>61</sup> Aprilia Theresia et al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 210.

- a. Sikap yang mendorong untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat kemajuan pembangunan.
- b. Sikap terhadap pihak penguasa atau pelaksana pembangunan secara keseluruhan.
- c. Sikap yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup.
- d. Sikap kemandirian terhadap kemampuan diri untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kriteria utama sebuah kerangka pikir adalah adanya alur ide logis yang menghasilkan hipotesis. Kerangka ini mencerminkan hubungan antar variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dijelaskan. Teori-teori tersebut dianalisis secara sistematis untuk merangkum hubungan antar variable yang diteliti. Menurut Uma Sekaran, kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai isu penting<sup>62</sup>.

Kerangka pemikiran penelitian ini, akan menganalisis rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Parepare yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, menurut teori dari Holil<sup>63</sup> dan Margono Slamet<sup>64</sup>. Untuk mengatasi isu tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare berperan penting dalam meningkatkan partisipasi, kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi perempuan,. Hal ini sesuai dengan pandangan teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero<sup>65</sup> melalui program-program

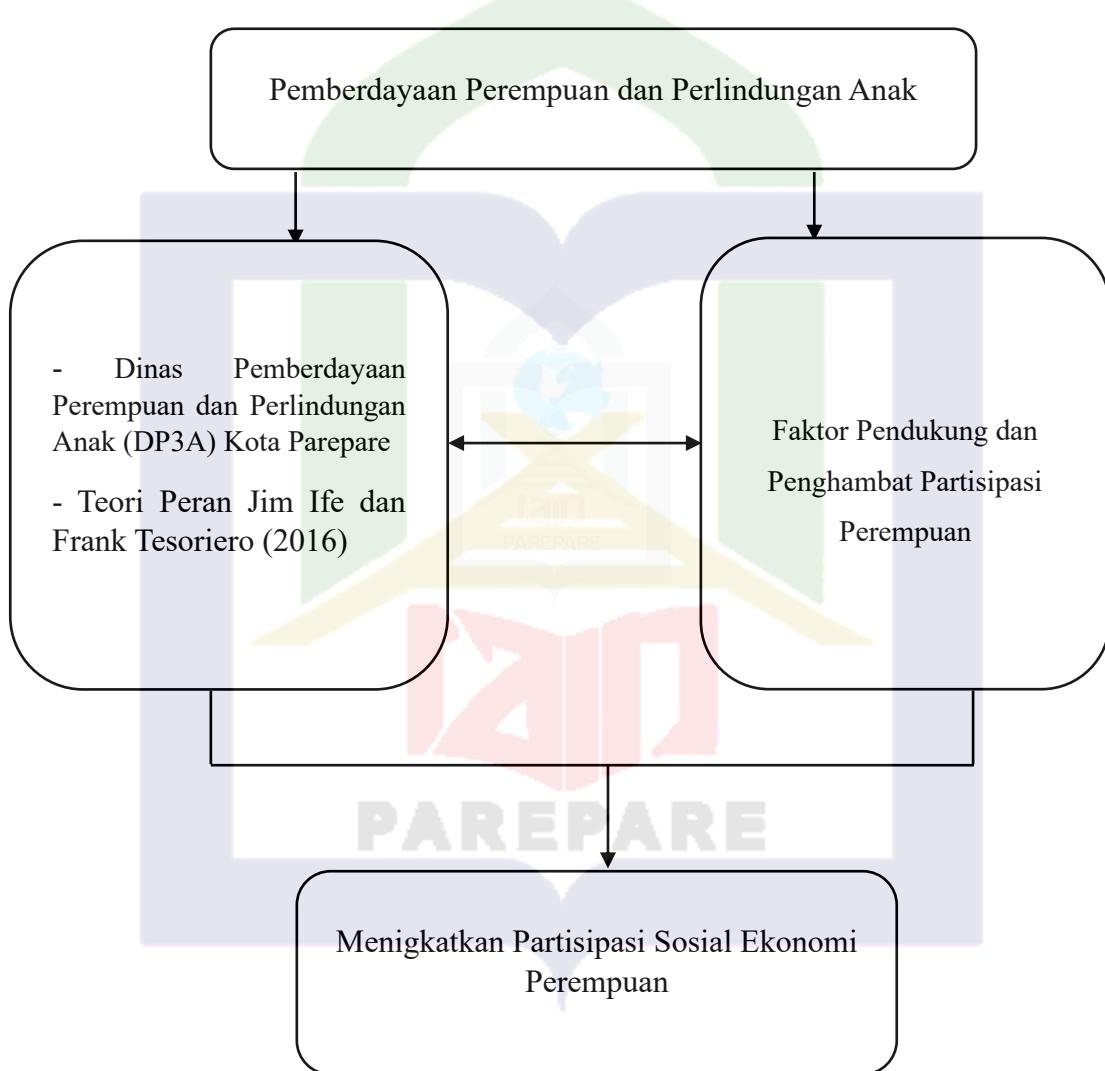
<sup>62</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 60.

<sup>63</sup> Holil Soelaiman, *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, 1980). h. 9-10.

<sup>64</sup> Aprilia Theresia et al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 207-210.

<sup>65</sup> Ife and Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development*. h. 558.

pemberdayaan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan kesetaraan gender di Kota Parepare.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki perilaku individu atau kelompok serta fenomena sosial dalam konteks alami, menghasilkan data deskriptif yang dikumpulkan secara lisan dan tulisan. Menurut Schensul, menjelaskan bahwa metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami karakteristik dan makna dari perilaku individu, masyarakat dan organisasi<sup>66</sup>. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu meneliti isu secara spesifik karena metodologi kualitatif menunjukkan bahwa setiap isu memiliki karakteristik yang berbeda<sup>67</sup>.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan untuk berbagai tujuan. Metode ini dapat digunakan dalam situasi dimana isu penelitian belum jelas, untuk memahami makna data yang dikumpulkan, mengembangkan teori baru, memastikan keakuratan data dan meneliti perkembangan<sup>68</sup>. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu metode penelitian yang mendalami satu atau beberapa isu dalam konteks nyata untuk memahami fenomena tertentu. Namun, studi kasus juga mengungkapkan pola, teori atau content yang lebih luas, bukan hanya sekadar memahami satu isu.<sup>69</sup>.

<sup>66</sup> M. Sobry Sutikno and Prosmala Hadisaputra, Penelitian Kualitatif (Lombok: Holistica, 2020), h. 5.

<sup>67</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

<sup>68</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur et al., Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup, 2022), h. 12-13.

<sup>69</sup> Rusdin Tahir et al., Metodologi Penelitian (Teori, Masalah Dan Kebijakan) (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 236.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilaksanakan, dengan fokus pada pengamatan fenomena nyata dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, di Jl. Chalik No. 08, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Lokasi ini dipilih karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare memiliki wewenang dan sudut pandang yang relevan dalam isu pemberdayaan perempuan.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan sejak surat penelitian diterbitkan termasuk proses pengumpulan dan pengolahan data.

## C. Fokus penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus penelitian adalah domain tunggal atau beberapa domain yang berhubungan dengan situasi sosial. Penentuan fokus penelitian pada penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial. Kebaruan ini bisa berupa pemahaman yang lebih dalam atau pengembangan hipotesis baru<sup>70</sup>. Wening mendefenisikan fokus penelitian sebagai unsur atau faktor yang membantu peneliti untuk tetap fokus pada topik tertentu dan menghindari timbulnya masalah baru. Dengan fokus pada topik, peneliti dapat mencari dan mengumpulkan data dengan lebih mudah dan menganalisisnya sesuai dengan topik

---

<sup>70</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 208-209.

penelitian<sup>71</sup>. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian adalah bahan informasi yang terdiri dari fakta dan statistic yang dikumpulkan oleh peneliti. Sumber data mewakili subjek utama dari mana informasi diperoleh dan digunakan untuk menarik kesimpulan dari fenomena yang diteliti<sup>72</sup>. Penelitian kualitatif mengklasifikasikan sumber data menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder<sup>73</sup> :

##### 1. Data Primer

Data primer adalah merupakan informasi yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber asli atau partisipan untuk pertama kalinya. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk observasi langsung, survei, wawancara. Data primer diklasifikasikan sebagai data mentah atau asli karena diambil dari sumber yang belum diolah atau diproses dalam bentuk apapun oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diambil dari hasil observasi dan wawancara dengan informan kunci.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya dan tidak diperoleh secara langsung, seperti buku, artikel dan laporan resmi. Hal ini mencakup catatan dari buku dan jurnal tentang partisipasi sosial ekonomi perempuan di Indonesia serta data statistic dari Badan Pusat

---

<sup>71</sup> Hani Subakti et al., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), h. 27.

<sup>72</sup> Nanang Abdul Jamal and Ahmad Wahyudi, Metodologi Penelitian (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), h. 104.

<sup>73</sup> Dian Muslimin et al., Metodologi Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran (Sumatera Barat: CV. Lauk Puyu Press, 2024), h. 58.

Statistik yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Parepare.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penggunaan berbagai alat pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sugiyono, menyarankan bahwa Teknik pengumpulan data adalah aspek strategis yang bertujuan untuk memperoleh data. Tanpa pemahaman tentang teknik tersebut, peneliti tidak dapat memperoleh data sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

### 1. Observasi

Secara etimologi, kata observasi berasal dari bahasa latin “*observationis*” berarti “melihat” atau “memperhatikan”. Secara umum, observasi merupakan proses mengamati objek di lapangan secara langsung dengan teliti. Proses observasi yang detail membutuhkan keterlibatan panca indera yang berlandaskan pada fakta empiris<sup>74</sup>. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung beragam aspek, seperti ruang, tempat, pelaku, aktivitas, objek, waktu dan peristiwa dilapangan. Tujuan utama dari observasi adalah memberikan gambaran deskripsi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian<sup>75</sup>.

Terdapat berbagai jenis observasi yang dapat diterapkan dalam penelitian, sesuai dengan tujuan dan karakteristiknya. Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur dan non-partisipan. Observasi terstruktur dirancang secara sistematis mengenai objek, waktu dan lokasi. Observasi non-

---

<sup>74</sup> Hani Subakti et al., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), h. 73.

<sup>75</sup> Muhammad Isa Alamsyahbana et al., Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), h. 110.

partisipan berarti peneliti mengamati tanpa terlibat langsung. Dalam hal ini, peneliti hanya mencatat fenomena tanpa interaksi langsung dengan subjek.<sup>76</sup>.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi verbal yang dilakukan dalam bentuk percakapan untuk mendapatkan informasi secara mendalam antara peneliti dan obyek penelitian<sup>77</sup>. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur. Metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul secara alami selama wawancara. Meskipun peneliti memiliki kerangka pertanyaan yang telah disiapkan, pertanyaan tersebut dapat disesuaikan berdasarkan tanggapan informan<sup>78</sup>.

Informan ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*, Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif, menekankan pada jumlah subjek atau informan yang terbatas<sup>79</sup>. Teknik ini menekankan pada dari jumlah subjek yang sedikit semakin lama semakin berkembang menjadi banyak. Jumlah informan yang menjadi subjek terus bertambah sesuai kebutuhan dan terpenuhinya informasi. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak<sup>80</sup>.

---

<sup>76</sup> Dian Muslimin et al., *Metodologi Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran* (Sumatera Barat: CV. Lauk Puyu Press, 2024), h. 83.

<sup>77</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 143.

<sup>78</sup> Dian Muslimin et al., *Metodologi Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran* (Sumatera Barat: CV. Lauk Puyu Press, 2024), h. 87.

<sup>79</sup> Roos Yuliastina and Isyanto, *Pengantar Metode Penelitian Sosial* (Pamekasan: Wiraja Press, 2024). h. 37.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 85.

Informan kunci pada penelitian ini adalah Ibu Sriyanti Ambar, selaku Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare. Pemilihan informan kunci ini didasarkan pada posisi strategis dan memiliki pemahaman komprehensif terhadap topik penelitian mengenai isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan.

Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare	1 Orang
--	---------

Adapun dalam penelitian ini, peneliti juga memiliki informan pendukung atau informan tambahan yang dapat memperjelas dan memperkuat dalam memberikan data. Pelatihan program pemberdayaan perempuan yang diadakan terakhir antara Tahun 2022 dan 2023 yang memiliki keterbatasan dalam hal jumlah peserta yang dapat diidentifikasi. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam menentukan jumlah informan yang dapat diwawancara secara langsung. Oleh karena itu, dari total 30 perempuan penerima manfaat yang diketahui, hanya 3 informan yang memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam mengenai partisipasi dalam mengikuti program pemberdayaan perempuan. Walaupun informan terbatas, tetapi dapat mewakili variasi dalam pengalaman dan latar belakang sehingga data yang diperoleh tetap beragam. Teknik *snowball sampling* memungkinkan peneliti untuk secara bertahap mengumpulkan infomasi. Peneliti memilih satu atau dua perempuan penerima manfaat yang dianggap mengetahui topik penelitian, karena wawancara yang dilakukan diaanggap belum lengkap, peneliti kemudian meminta rekomendasi informan tambahan untuk melengkapi data tersebut.

Perempuan Penerima Manfaat	3 orang
----------------------------	---------

### **3. Dokumentasi**

Istilah dokumentasi diambil dari kata “dokumen” yang berarti barang tertulis, mengacu pada Teknik pengumpulan data yang meliputi pengambilan informasi untuk menelusuri fakta sejarah dan catatan tentang individua atau kelompok dalam konteks sosial. Teknik dokumentasi mencakup pengumpulan informasi dari buku, yang membahas pendapat, teori atau hukum terkait fenomena penelitian dan foto. Metode dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat dan mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara<sup>81</sup>.

### **F. Uji Keabsahan Data**

Keakuratan dan validitas sangat penting dalam penelitian kualitatif, meskipun temuan tidak dapat digeneralisasikan secara statistik. Temuan tersebut harus akurat dan valid. Hal ini dapat dilakukan menggunakan teknik, seperti triangulasi yang melibatkan perbandingan data dari beberapa sumber atau metode<sup>82</sup>. Uji keabsahan data adalah memastikan bahwa temuan yang dihasilkan sesuai dengan data dalam konteks fenomena penelitian<sup>83</sup>. Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi adalah cara memastikan kredibilitas data dengan membandingkan berbagai sumber, teknik dan waktu pengambilan data, diantaranya<sup>84</sup> :

#### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah Teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkannya dengan data dari berbagai sumber. Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data dari beragam

<sup>81</sup> Geofakta Razali et al., Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), h. 147-148.

<sup>82</sup> Hani Subakti et al., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), h. 5.

<sup>83</sup> Hani Subakti et al., (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), h.112.

<sup>84</sup> Geofakta Razali et al., Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), h. 172-174.

sumber, seperti wawancara dengan beberapa informan. Hal ini memungkinkan adanya perbandingan antara informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda. Selain itu, metode ini juga dapat membantu peneliti dalam memahami alasan dibalik perbedaan data yang diperoleh dari informan yang berbeda.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik bertujuan untuk menguji validitas informasi dengan mengumpulkan data dari sumber yang sama melalui berbagai metode pengumpulan data yang beragam.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara atau metode lainnya pada waktu yang berbeda. Jika hasilnya bervariasi, maka pengujian dilakukan berulang kali hingga diperoleh data yang akurat dengan pengecekan dari satu sumber utama.

## 4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini dilakukan untuk mengkaji topik yang sedang diteliti dari berbagai perspektif teori. Sebuah fenomena dalam masyarakat akan diselidiki dengan menggunakan tidak hanya satu teori sosial, tetapi juga perspektif budaya, politik dan teori-teori terkait lainnya. Untuk mencapai temuan yang signifikan peneliti harus memiliki pemahaman teori secara kompleks untuk memperoleh kesimpulan mendalam dan bermakna<sup>85</sup>.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah merupakan cara untuk memahami dan menginterpretasikan informasi deskriptif yang tidak dapat dinilai dengan pendekatan kuantitatif.. Data ini seringkali dikumpulkan melalui observasi, transkrip wawancara, pengamatan lapangan, analisis dokumen dan metode pengolahan data lainnya agar data

<sup>85</sup> Agus Sholahuddin, Metodologi Penelitian Sosial Perspektif Kuantitatif-Kualitatif (Malang: Edulitera, 2021), h. 33-34.

mudah diakses dan dianalisis<sup>86</sup>. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman mengklasifikasikan Teknik analisis penelitian kualitatif ke dalam tiga komponen yang berinteraksi satu sama lain dengan mengembangkan model interaktif yang terdiri dari beberapa tahapan tertentu :<sup>87</sup> :

### **1. Data Reduction**

Reduksi data merupakan Langkah untuk memilih, mengklasifikasikan, menyederhanakan dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Pada tahap ini, peneliti berupaya memilih data yang relevan, mendukung dan konsisten dengan fenomena yang sedang diteliti.

### **2. Data Display**

Penyajian data adalah tahap kedua setelah proses reduksi data, Melalui penyajian data, peneliti dapat menampilkan data dalam bentuk yang lebih informatif sehingga mempermudah analisis dan pemahaman terhadap hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk ringkasan yang disusun dalam kalimat-kalimat dasar yang saling terhubung secara naratif.

### **3. Conclusion; Drawing/Verifying**

*Conclusion* merupakan tahap akhir dalam proses penelitian, di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi. menarik kesimpulan dan verifikasi data. Kualitas kesimpulan yang dihasilkan pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh dua tahap sebelumnya, yaitu reduksi data dan display data. Kemampuan peneliti dalam menemukan makna dari fenomena, peristiwa dan objek yang ditemui selama penelitian juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas kesimpulan.

---

<sup>86</sup> Yusuf Tojiri, Hari Setia Putra, and Nur Faliza, Dasar Metodologi Penelitian : Teori, Desain Dan Analisis Data (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2023), h. 150.

<sup>87</sup> M. Sobry Sutikno and Prosmala Hadisaputra, Penelitian Kualitatif (Lombok: Holistica, 2020), h. 139-142.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare memiliki peran yang krusial dalam mendorong partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Melalui berbagai inisiatif, pelatihan dan program pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare berkomitmen untuk memberdayakan perempuan, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan peran mereka di masyarakat.

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Berdasarkan dengan ketentuan peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi :

- a. Sekretariat membidangi 2 sub bagian :
  - 1. Sub bagian adminisstrasi umum dan kepegawaian.
  - 2. Sub bagian program dan keuangan.
- b. Bidang kesetaraan gender membawahi 3 seksi, terdiri atas :
  - 1. Seksi kesetaraan gender bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum.
  - 2. Seksi ketahanan dan kualitas keluarga.
  - 3. Seksi data dan informasi gender dan anak.
- c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi 3 seksi, terdiri atas :
  - 1. Seksi perlindungan hak perempuan.
  - 2. Seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak.
  - 3. Seksi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak<sup>88</sup>.

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare bertugas menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Parepare untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare melaksanakan tugas berdasarkan fungsi yang dimilikinya, antara lain :

- 1. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam bidang kesetaraan gender bidang perlindungan perempuan dan anak.
- 2. Penetapan data system gender dana anak.
- 3. Koordinasi dan sinergisasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak.
- 4. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender.

---

<sup>88</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, “Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2024-2026,” 2023, h. 13.

5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan dan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian perlengkapan dan peralatan pengaasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memiliki rincian tugas sebagai berikut :

1. Membuat rencana program/kegiatan kerja dinas.
2. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Parepare.
3. Melaksanakan peemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
4. Membina dan mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak<sup>89</sup>.

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat berada di bawah pimpinan seorang sekretaris yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan yang mencakup administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan kewenangan. Seorang Sekretaris mempunyai fungsi-fungsi berikut dalam melaksanakan tugasnya :

---

<sup>89</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, “Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2024-2026,” 2023, h. 14-15.

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pembinaan dan penetapan organisasi dan tata laksana.
5. Koordinasi dan penyusunan perundang-undangan serta pelaksanaan administrasi hukum internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
6. Penyelenggaraan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi<sup>90</sup>.

### c. Bidang Kesetaraan Gender

Bidang kesetaraan gender dipimpin oleh seorang kepala bidang kesetaraan gender yang melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam mewujudkan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pengarusutamaan gender dan ekonomi serta meningkatkan kualitas keluarga. Kepala kesetaraan gender memiliki fungsi dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi :

---

<sup>90</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, “Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2024-2026,” 2023, h. 15.

1. Perumusan kebijakan teknis pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga.
2. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik hukum, ekonomi dan kualitas keluarga
3. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada Lembaga pemerintah tingkat daerah dan provinsi.
4. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan provinsi.
5. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah dan provinsi.
6. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak tingkat daerah provinsi.
7. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota.
8. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
9. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
10. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pengelolaan data informasi gender anak.
11. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
12. Pelaksanaan penyajian data, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak.
13. Pelaksanaan administrasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak.

14. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
15. Pelaksanaan administrasi pengelolaan bidang kesetaraan gender.
16. Pelaksanaan tugas kedinasan kain sesuai bidang tugasnya<sup>91</sup>.

**d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Bidang perlindungan perempuan dan anak dipimpin oleh kepala bidang perlindungan perempuan dan anak yang memiliki tugas untuk membantu kepala dinas dalam melakukan aktivitas perlindungan bagi perempuan dan anak. Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak memiliki berbagai fungsi dalam melaksanakan tugas, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak.
3. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kota.
4. Penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota.
5. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kota.
6. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan non usaha tingkat kota.
7. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota.
8. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kota.

---

<sup>91</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, “Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2024-2026,” 2023, h. 15-16.

9. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan jhusus tingkat kota.
10. Pelaksanaan administrasi pengelolaan bidang perlindungan perempuan dan anak.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan<sup>92</sup>.

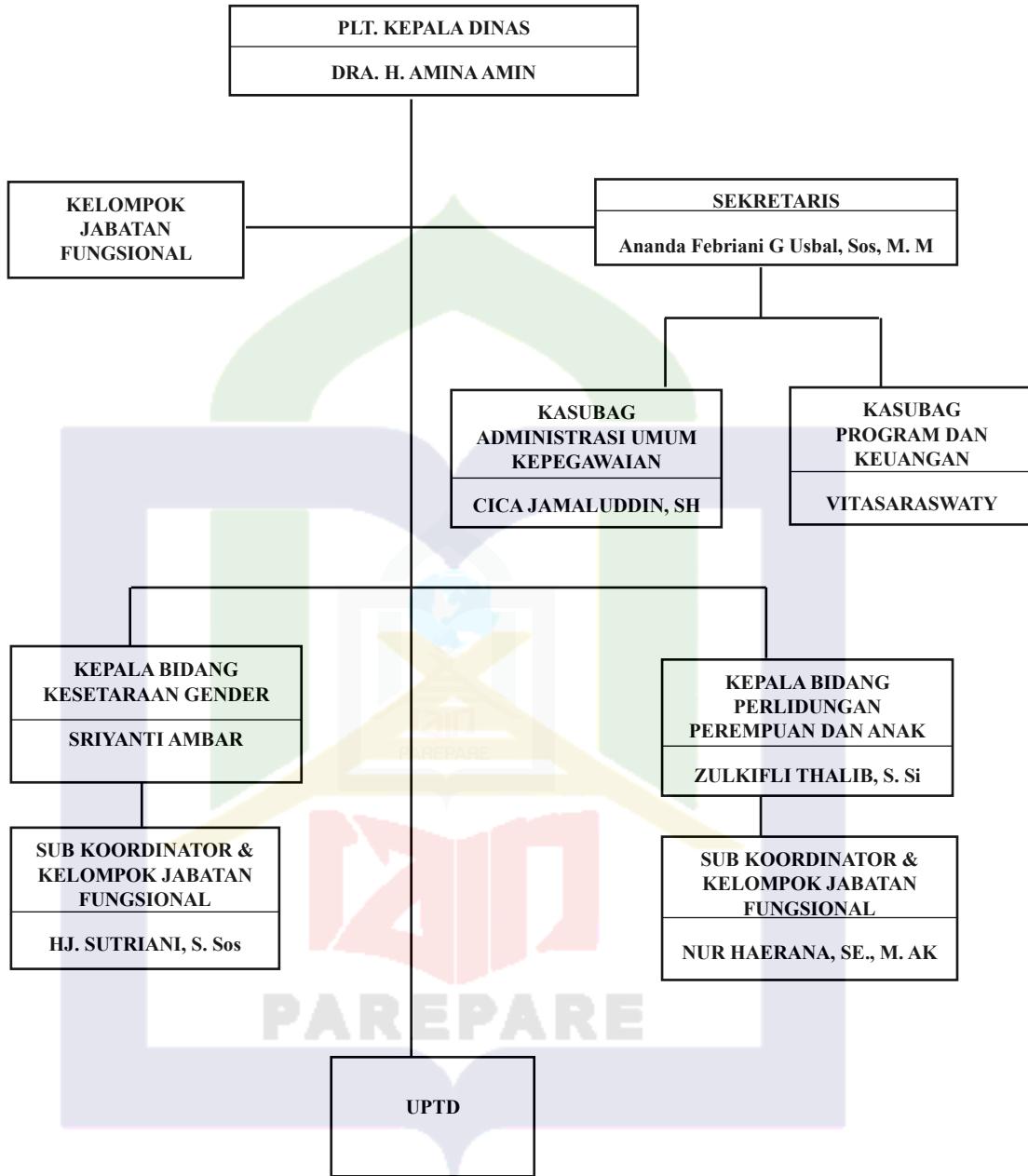
### Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka susunan organisasi adalah sebagai berikut<sup>93</sup> :



<sup>92</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, “Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2024-2026,” 2023, h. 17.

<sup>93</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, “Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2024-2026,” 2023, h. 17.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2024-2026

Dengan adanya program-program yang dirancang khusus untuk perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan diri yang diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare sebagai penghubung antara pemerintah dan komunitas, memastikan bahwa aspirasi perempuan didengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare berperan sebagai penggerak perubahan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Sriyanti selaku Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, beliau menjelaskan bahwa :

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan berbasis gender baik yang mempunyai anggaran maupun yang tidak mempunyai anggaran. Program yang mempunyai anggaran berdasarkan target atau indikator kinerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh DP3A sedangkan pelaksanaan program yang tidak memiliki anggaran kita laksanakan melalui kerja sama dengan organisasi yang mempunyai visi misi yang sama untuk meningkatkan partisipasi perempuan, peningkatan wawasan perempuan, peningkatan semangat perempuan.”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara di atas dengan Ibu Sriyanti selaku Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare yang peneliti peroleh adalah bahwa program berbasis gender menyiratkan adanya upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan. Ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak perempuan diperhatikan dalam setiap inisiatif. Program yang memiliki anggaran harus

---

<sup>94</sup> Sriyanti, Kepala Bidang Gender DP3A Kota Parepare, wawancara di DP3A Kota Parepare, 20 November 2024.

dilaksanakan berdasarkan target atau indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya sistem pengukuran untuk mengevaluasi efektivitas program yang dilaksanakan. Untuk program yang tidak memiliki anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare bekerja sama dengan organisasi lain yang memiliki visi dan misi serupa dalam pemberdayaan perempuan. Melalui kolaborasi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare tetap dapat melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, memperluas wawasan mereka serta menumbuhkan semangat kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Sriyanti, selaku Kepala Bidang Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, mengatakan bahwa :

Terkait pelatihan di bidang ekonomi, kita melakukan pendampingan kepada organisasi perempuan dan kelompok rentan. Bagaimana cara meningkatkan ekonominya melalui pelatihan kewirausahaan. Ini sudah berapa kali kewirausahaan tersebut dilakukan. Pertama, kita melakukan bagaimana mengubah limbah rumah tangga menjadi bernilai ekonomi, kemudian kami juga mendampingi dalam bentuk pelatihan membuat tulis. Ketiga, itu ecoprint. Keempat pelatihan kewirausahaan daur ulang plastik menjadi bunga dan tas kerajinan.”<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan di bidang ekonomi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare melakukan pendampingan kepada organisasi perempuan dan perempuan kelompok rentan tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan ini telah dilakukan beberapa kali dengan berbagai bentuk pelatihan.

---

<sup>95</sup> Sriyanti, Kepala Bidang Gender DP3A Kota Parepare, wawancara di DP3A Kota Parepare, 20 November 2024.

Diantaranya, memberikan pelatihan tentang cara mengubah limbah rumah tangga menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, mendampingi perempuan dalam pelatihan membatik tulis, memberikan pelatihan ecoprint dan memberikan pelatihan kewirausahaan daur ulang plastik menjadi bunga dan tas kerajinan. Melalui berbagai pelatihan kewirausahaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi perempuan di Kota Parepare. Pendampingan yang diberikan diharapkan dapat mendorong partisipasi ekonomi perempuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sasaran utama program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare adalah kelompok rentan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pelatihan yang diselenggarakan di fokuskan memberdayakan perempuan kelompok rentan agar mereka dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada di lingkungan mereka. Untuk mendalami lebih lanjut mengenai upaya pemberdayaan perempuan kelompok rentan, wawancara dilakukan dengan Ibu Sriyanti, selaku Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare :

Untuk program yang dilaksanakan dari DP3A itu 1 kali setahun, tetapi kita harapkan ini di tindaklanjuti di masing-masing kelurahan untuk perempuan kelompok rentan. Artinya kita hanya memberikan contoh melakukan pelatihan kepada perwakilan-perwakilan perempuan kelompok rentan di setiap kecamatan atau kelurahan. Kemudian nanti ditindak lanjuti lagi dengan sendirinya, kita lakukan ini untuk efisiensi anggaran karena memang kita keterbatasan anggaran untuk beberapa orang saja.”<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare diadakan satu kali setahun, dengan harapan agar pelatihan tersebut dapat

---

<sup>96</sup> Sriyanti, Kepala Bidang Gender DP3A Kota Parepare, Wawancara di DP3A Kota Parepare, 20 November 2024.

ditindaklanjuti di masing-masing kecamatan atau kelurahan oleh perempuan kelompok rentan. Pendekatan ini melibatkan pemberian pelatihan kepada perwakilan perempuan di setiap kecamatan atau kelurahan, yang diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota kelompok lainnya. Namun, strategi ini juga mencerminkan keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh DP3A, sehingga efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, tanpa dukungan dan tindak lanjut yang memadai dari pelatihan dengan sumber daya terbatas yang tidak dapat dirasakan secara luas oleh seluruh kelompok perempuan rentan.

Dalam upaya peningkatan partisipasi sosial ekonomi perempuan, wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sriyanti, selaku Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare mengungkapkan bahwa segala sumberdaya, termasuk sumber daya manusia, sumber dana serta prasarana dan sarana dimanfaatkan secara optimal.

Semuanya kami manfaatkan mulai dari sumber daya manusia, sumber dana atau anggaran kita gunakan semua untuk peningkatan partisipasi sosial ekonomi perempuan.”<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare secara optimal memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun anggaran untuk sarana dan prasarana dengan tujuan utama meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan. Dengan memanfaatkan setiap sumber daya untuk menciptakan dampak yang lebih besar dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.

---

<sup>97</sup> Sriyanti, Kepala Bidang Gender DP3A Kota Parepare, wawancara di DP3A Kota Parepare, 20 November 2024.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sriyanti, selaku Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, mengatakan bahwa :

Program pelatihan di DP3A hanya melakukan pelatihan, tetapi kita mengundang pemateri. Kalau kerja sama dalam hal anggaran tidak ada. Kita hanya mengundang narasumber yang memang mampu di bidangnya, kita datangkan dengan dukungan dana dari DP3A untuk narasumber atau instrukturnya.”<sup>98</sup>

Dari hasil hasil wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Paepare berfokus pada pelaksanaan pelatihan dengan mengundang narasumber dan instruktur yang di undang menggunakan dana dari DP3A Kota Parepare, tanpa adanya kerja sama pendanaan dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa DP3A Kota Parepare mengelola pelatihan secara mandiri dengan memprioritaskan kualitas pemateri yang kompeten di bidangnya, meskipun keterbatasan anggaran tidak melibatkan mitra eksternal dalam pembiayaan pelatihan. Upaya dari DP3A Kota Parepare untuk memastikan pelatihan berjalan efektif dengan sumber daya yang ada sekaligus menjadi tantangan dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan.

Salah satu kendala utamanya itu adalah mindset masyarakat yang masih terikat pada norma-norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan. Patriarki juga masih kuat di masyarakat, padahal dukungan sudah tersedia. Maka dari itu, penting bagi DP3A untuk mengedukasi agar mereka mau mengambil bagian dan berkontribusi dalam program-program yang ada.”<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Sriyanti, Kepala Bidang Gender DP3A Kota Parepare, wawancara di DP3A Kota Parepare, 20 November 2024.

<sup>99</sup> Sriyanti, Kepala Bidang Gender DP3A Kota Parepare, wawancara di DP3A Kota Parepare, 20 November 2024.

Dari hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa tantangan kultural yang dihadapi dalam mendorong partisipasi perempuan, khususnya terkait dengan norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan. Sistem patriarki yang masih kuat di masyarakat menjadi hambatan, meskipun dukungan untuk perempuan sebenarnya sudah tersedia. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare memandang penting untuk melakukan edukasi untuk mendorong perempuan agar ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program-program yang diselenggarakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sriyanti, selaku Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare mengatakan bahwa :

Untuk program pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesadaran akan perannya tersebut sesuai tupoksi perwali kita merujuk disitu. Adapun perubahan itu biasanya terhadap sasaran yang hendak dicapai tiap tahunnya berbeda. Selain itu juga dilakukan perubahan strategi apabila strategi A belum tercapai hasilnya, maka strategi berikutnya kami ubah. Kalau bukan sasarannya berubah berarti strateginya yang kami ubah.”<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa sasaran program pemberdayaan perempuan di Kota Parepare berbeda setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Kota Parepare. Selain perubahan sasaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare juga melakukan perubahan strategi program pemberdayaan perempuan apabila strategi sebelumnya belum mencapai hasil yang optimal. Pada Tahun 2022, sasaran program adalah mengadakan pelatihan membuat ecoprint. Namun, pada Tahun 2023 sasaran program berubah menjadi peningkatan keterampilan perempuan dalam berwirausaha dengan membuat

---

<sup>100</sup> Sriyanti, Kepala Bidang Gender DP3A Kota Parepare, wawancara di DP3A Kota Parepare, 20 November 2024.

kerajinan tangan. Perubahan dalam program pemberdayaan perempuan ini menunjukkan adanya upaya yang terus-menerus dilakukan terkait untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal ini bertujuan agar program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Sriyanti, selaku Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, mengatakan bahwa :

Terlebih dahulu mengidentifikasi isu, bagaimana kita melihat masalah yang terjadi atau memotret masalah yang ada di Kota Parepare. Setelah mengetahui isu-isu yang dialami di bidang gender, dari isu tersebut kita analisis lagi untuk melihat, menentukan dan mencari solusi permasalahan dari isu tersebut. Solusi dari isu tersebut yang diharapkan adalah adanya keterlibatan akses atas partisipasi kontrol dan manfaat dari semua gender termasuk disabilitas juga ada, sehingga tidak ada kelompok yang termarjinalkan. Semua bisa memanfaatkan dan mendapatkan informasi mengenai apa yang telah dibangun oleh pemerintah melalui program dan kegiatan pembangunan.”<sup>101</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi isu-isu yang terjadi terkait dengan masalah gender di Kota Parepare. Setelah mengetahui isu-isu yang dialami, pihak dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan solusi yang tepat. Solusi yang diharapkan adalah adanya keterlibatan dan akses yang setara atas partisipasi, kontrol serta manfaat dari semua gender, termasuk penyandang disabilitas, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Pentingnya penyebaran informasi yang merata

---

<sup>101</sup> Sriyanti, Kepala Bidang Gender DP3A Kota Parepare, wawancara di DP3A Kota Parepare, 20 November 2024.

mengenai program-program pembangunan yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa transparansi dan aksebilitas informasi menjadi salah satu prioritas dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kota Parepare.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Sriyanti, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota, mengatakan bahwa :

PAREPARE  
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan cara kami melakukan analisis yang didukung oleh regulasi. Jadi semua sudah sesuai SKPD yang isinya isu-isu gender yang akan diimplementasikan dan di *follow up* dengan adanya analisis gender. Di analisis gender inilah dilaksanakan program dan kegiatan isu gender yang terjadi.”<sup>102</sup>

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh setelah wawancara menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis regulasi. Dengan melakukan analisis yang mendalam, bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Perangkat daerah (SKPD) yang mengatur isu-isu gender. Proses ini melibatkan identifikasi dan pemetaan isu-isu gender yang ada, yang kemudian diimplementasikan melalui program-program pemberdayaan perempuan. Analisis gender yang dilakukan tidak hanya berfungsi untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh perempuan, tetapi juga untuk menentukan Langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah yang dialami. Dengan demikian, semua kegiatan yang dihasilkan tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam meningkatkan partisipasi perempuan diberbagai bidang sosial dan ekonomi di Kota Parepare.

---

<sup>102</sup> Sriyanti, Kepala Bidang Gender DP3A Kota Parepare, wawancara di DP3A Kota Parepare, 20 November 2024.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare.**

Partisipasi aktif perempuan dalam proses pemberdayaan merupakan faktor utama untuk mencapai keberhasilan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perempuan telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai proses pemberdayaan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan, penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa penerima manfaat program. Hasil wawancara tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi berbagai aspek penting terkait keterlibatan perempuan dalam proses pemberdayaan.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare, pelaksanaan program pemberdayaan ini di pengaruhi dari berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Berikut akan dipaparkan mengenai faktor-faktor tersebut. Wawancara dilakukan dengan 3 perempuan penerima manfaat dari program pemberdayaan perempuan, yaitu Ibu Lidia, Ibu Yuyun dan Ibu Bina.

### **a. Keyakinan Diri**

Keyakinan Diri yang dimiliki oleh perempuan penerima manfaat dapat memotivasi dan mendorong keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, tampaknya ada variasi tingkat keyakinan diri yang dimiliki oleh perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau mengatakan bahwa :

Faktor yang mempengaruhi saya untuk ikut program pemberdayaan adalah dorongan dari keluarga dan teman-teman, ini yang

mempengaruhi saya untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan.”<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau mengatakan bahwa :

Saya terinspirasi untuk mengikuti program pemberdayaan setelah melihat perubahan positif pada teman-teman yang sudah lebih dulu ikut. Mereka menunjukkan bahwa dengan keyakinan diri yang kuat, kita bisa memperbaiki hidup kita. Keyakinan ini sangat penting, karena memberi saya motivasi untuk terlibat dalam kegiatan sosial ekonomi.”<sup>104</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Bina (Pramuniaga), beliau mengatakan bahwa :

Pengalaman saya di komunitas sangat mempengaruhi keputusan saya untuk ikut program pemberdayaan. Saya melihat, banyak perempuan yang sebelumnya tidak mengikuti program pemberdayaan perempuan, tetapi setelah mengikuti program, mereka menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Melihat perubahan ini, keyakinan diri saya tumbuh ketika saya menyadari bahwa setiap orang memiliki potensi dan saya ingin menjadi bagian dari perubahan itu.”<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lidia, Ibu Yuyun dan Ibu Bina mengungkapkan bahwa keyakinan diri dalam berpartisipasi pada program pemberdayaan perempuan di pengaruhi oleh dukungan sosial dan pengalaman positif dari lingkungan sekitar. Dukungan keluarga dan teman-teman bagi Ibu Lidia yang menjadi faktor dalam mengambil keputusan berpartisipasi, sementara Ibu Yuyun termotivasi oleh bukti nyata perubahan positif yang diamatinya dari teman-teman yang telah lebih dulu mengikuti program. Hal serupa juga dialami oleh Ibu Bina, di mana pengalamannya langsung menyaksikan transformasi positif dalam komunitasnya tidak

---

<sup>103</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>104</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>105</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

hanya mendorong partisipasinya tetapi juga menumbuhkan keyakinan diri yang lebih kuat.

### **b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat**

Hubungan sosial dan tingkat solidaritas yang terjalin diantara perempuan penerima manfaat memiliki hubungan sosial yang cukup baik dengan warga sekitar. Mereka saling mengenal dan berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau menyatakan bahwa :

Rasa solidaritas yang kuat, diantara kami membuat saya merasa lebih terinspirasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan, karena saya tahu ada dukungan dari teman-teman.”<sup>106</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau menyatakan bahwa :

Dari pengalaman saya, hubungan dengan anggota masyarakat dalam komunitas yang ada sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi. Kami sering mengadakan pertemuan untuk merencanakan kegiatan dan itu membuat saya merasa lebih terhubung dengan mereka. Saya juga menyadari ada perempuan di luar komunitas yang belum mendapatkan akses ke program ini. Saya berusaha menjalin hubungan dengan mereka agar bergabung dan merasakan manfaat yang sama.”<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau menyatakan bahwa :

Rasa solidaritas sangat terasa, setelah bergabung dengan program pemberdayaan perempuan, saya menemukan komunitas-komunitas perempuan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan saya. Kami saling mendukung dan berbagi informasi tentang kesempatan yang ada. Hubungan yang erat dengan anggota masyarakat membuat saya merasa

<sup>106</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>107</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

lebih percaya diri untuk berkontribusi. Ketika kami bersama-sama, kami dapat mengatasi tantangan yang ada dan mendorong satu sama lain untuk terlibat lebih aktif.”<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh rasa solidaritas dan ikatan sosial dalam komunitas. Ibu Lidia merasakan inspirasi untuk berpartisipasi yang di dorong oleh dukungan dari sesama anggota, sementara Ibu Yuyun menekankan pentingnya pertemuan rutin dalam komunitas yang tidak hanya meningkatkan partisipasinya tetapi juga mendorongnya untuk menjangkau perempuan lain di luar komunitas. Pengalaman serupa diungkapkan oleh Ibu Bina yang menemukan peningkatan kepercayaan diri melalui interaksi dengan komunitas perempuan. Temuan ini menggaris bawahi bahwa kekuatan jaringan sosial dan kebersamaan menjadi penggerak utama dalam mendorong dan mempertahankan partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan.

### c. Tanggung Jawab Sosial dan Komitmen dari Masyarakat

Tanggung jawab sosial dan komitmen dari masyarakat menjadi cerminan kesadaran kolektif yang mendalam terhadap permasalahan sosial, khususnya yang berkaitan dengan peran dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Aspek ini tidak hanya menggambarkan peran mereka dalam perubahan sosial, tetapi juga bagaimana mereka mengaktualisasikan pemahaman tersebut melalui keterlibatan aktif dalam berbagai upaya perbaikan di lingkungan mereka. Melalui wawancara yang telah dilakukan dengan perempuan penerima manfaat dapat terungkap bagaimana rasa tanggung jawab sosial membentuk pola partisipasi dan komitmen perempuan dalam menghadapi tantangan di komunitas mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau menyatakan bahwa :

---

<sup>108</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024

Sebagai merasa terdorong untuk mengambil tanggung jawab terhadap masalah sosial di lingkungan saya, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Komitmen saya untuk terlibat dalam upaya perbaikan sangat tinggi.”<sup>109</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau mengatakan bahwa :

Saya merasa lebih sadar akan isu sosial di lingkungan saya, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk memberi suara bagi mereka yang kurang beruntung.”<sup>110</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau mengatakan bahwa :

Saya aktif mengikuti program pemberdayaan perempuan di Kota Parepare dan selalu berusaha untuk berpartisipasi.”<sup>111</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya kesadaran dan tanggung jawab sosial yang kuat antara para penerima manfaat program pemberdayaan perempuan. Ibu Lidia memperlihatkan motivasi intrinsik yang tinggi dengan dorongan kuat untuk bertanggung jawab terhadap masalah sosial di lingkungannya yang ditunjukkan melalui pemahaman yang lebih mendalam dan komitmen yang tinggi dalam upaya perbaikan. Sejalan dengan hal tersebut, Ibu Yuyun juga menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap isu-isu sosial yang disertai dengan rasa tanggung jawab untuk menjadi penyumbang suara bagi kelompok yang kurang beruntung. Sementara itu, Ibu Bina mengaktualisasikan tanggung jawab sosialnya melalui partisipasi aktif dalam program pemberdayaan perempuan di Kota Parepare, menunjukkan komitmen yang konsisten dalam keterlibatannya pada program tersebut.

---

<sup>109</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>110</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>111</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

#### **d. Kemauan dan Kemampuan Untuk Mengubah atau Memperbaiki Keadaan dan Membangun Atas Kekuatan Sendiri**

Kesadaran akan kemampuan diri dan kemauan untuk berkontribusi dalam perubahan sosial menjadi aspek yang tidak hanya mencerminkan bagaimana perempuan memandang potensi mereka sebagai agen perubahan, tetapi juga menggambarkan peran aktif mereka dalam upaya perbaikan kondisi masyarakat. Pemahaman tentang kapasitas diri dan motivasi intrinsik ini menjadi landasan penting dalam mengukur efektivitas program pemberdayaan perempuan dalam membangun kemandirian dan kepercayaan pesertanya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau menyatakan bahwa :

Saya merasa mampu untuk berpartisipasi dalam upaya perubahan di masyarakat, terutama setelah mengikuti program pemberdayaan perempuan. Program ini memberi saya keterampilan dan pengetahuan yang saya butuhkan.”<sup>112</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau menyatakan bahwa :

Kemampuan yang saya miliki untuk berpartisipasi dalam upaya perubahan bahwa menyadari sekecil apapun kontribusi saya, dapat berdampak positif.”<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau menyatakan bahwa :

Kemampuan untuk berpartisipasi dalam upaya perbaikan kondisi di masyarakat dari kegiatan program pemberdayaan perempuan telah memberikan saya wawasan dan keterampilan yang membuat kemauan saya untuk terlibat sangat tinggi dan saya juga aktif bekerja sama dengan anggota perempuan lainnya dalam membangun lingkungan

<sup>112</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>113</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

yang lebih baik, dengan kerja sama kita bisa mengatasi tantangan yang ada.”<sup>114</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat memberikan gambarkan bagaimana program pemberdayaan perempuan di Kota Parepare telah mengalami transformative dalam meningkatkan kapasitas dan kemauan berpartisipasi bagi para pesertanya, sebagaimana terungkap melalui serangkaian wawancara dengan para perempuan penerima manfaat program. Hasil analisis mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya berhasil dalam aspek pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran dan kemampuan untuk berkontribusi pada perubahan yang positif di masyarakat. Ibu Lidia merasakan peningkatan kemampuan berpartisipasi yang signifikan melalui pemerolehan keterampilan dan pengetahuan baru dari program pemberdayaan. Begitu pula Ibu Yuyun yang memperlihatkan kesadaran mendalam tentang nilai kontribusi individual. Lebih lanjut, Ibu Bina menekankan pentingnya pengembangan kapasitas kolektif, dimana program pemberdayaan tidak hanya meningkatkan wawasan dan keterampilan individualnya, tetapi juga mendorong kerja sama aktif antar peserta dalam menghadapi tantangan bersama untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan mereka.

#### e. Prakarsa Masyarakat

Prakarsa masyarakat mengacu pada sejauh mana masyarakat, khususnya perempuan mengambil inisiatif dan berperan aktif dalam mengusulkan serta memulai berbagai kegiatan atau upaya di lingkungan mereka. Ketika perempuan penerima manfaat program pemberdayaan memiliki prakarsa untuk mengajukan ide, mengorganisir kegiatan, atau memobilisasi sumber daya masyarakat, hal ini dapat meningkatkan partisipasi mereka secara signifikan. Prakarsa tersebut, menunjukkan adanya rasa kepemilikan, motivasi dan keberdayaan dari perempuan penerima manfaat untuk terlibat aktif dalam program pemberdayaan. Tanggapan masyarakat terhadap

---

<sup>114</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

prakarsa yang dilakukan oleh perempuan juga menjadi hal yang penting. Jika masyarakat masyarakat cenderung menolak prakarsa yang diinisiasi oleh perempuan, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi partisipasi mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau mengatakan bahwa :

Saya belum mengusulkan memulai inisiatif di masyarakat, saya ingin melakukannya di komunitas. Berbagai pelatihan sangat dibutuhkan di komunitas kami. Tanggapan dari anggota komunitas sangat positif saat mendiskusikannya dan didukung untuk mengambil langkah lebih lanjut.”<sup>115</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau mengatakan bahwa :

Saya pernah mengusulkan untuk mengadakan pelatihan keterampilan menjahit bagi perempuan di lingkungan saya. Saya melihat banyak perempuan yang ingin belajar agar bisa mandiri. Tanggapan masyarakat sangat positif, banyak yang antusias dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan tersebut. Program ini tidak hanya membantu mereka belajar keterampilan baru, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara kami.”<sup>116</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau mengatakan bahwa :

Saya belum pernah melakukan inisiatif di masyarakat, tetapi saya sering mendengarkan aspirasi mereka mengenai hal-hal yang bisa kita lakukan bersama. Tanggapan terhadap inisiatif yang diusulkan oleh teman-teman sangat mendukung. Saya merasa terinspirasi oleh semangat mereka dan mau memulai terutama membantu sesama perempuan.”<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>116</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>117</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

Dari rangkaian wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa partisipasi aktif perempuan dalam program pemberdayaan di kota Parepare menunjukkan bahwa Ibu Lidia dan Ibu Bina mengungkapkan keinginannya untuk memulai inisiatif di komunitas, meskipun belum melakukannya. Ini menunjukkan adanya potensi untuk keterlibatan yang lebih aktif jika dukungan dan sumber daya tersedia. Adanya tanggapan positif masyarakat terhadap inisiatif Ibu Yuyun, terlihat dari antusiasme perempuan dalam mengikuti pelatihan keterampilan menjahit. Hal ini mengungkapkan bahwa ketika inisiatif diajukan, ada dukungan yang kuat dari komunitas.

#### f. Kepentingan Umum

Partisipasi perempuan penerima manfaat dalam program pemberdayaan perempuan di Kota Parepare tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti solidaritas, komitmen dan parakarsa masyarakat, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut dipandang dari sisi kepentingan umum. Dalam memahami pengaruh kepentingan umum terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan perempuan, perlu diperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Kepentingan umum mengacu pada manfaat dan dampak yang diberikan oleh program pemberdayaan perempuan bagi masyarakat secara luas.

Kepentingan umum mengacu pada manfaat dan dampak yang diberikan oleh program pemberdayaan perempuan bagi masyarakat secara luas. Jika program tersebut dianggap dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan mendorong kesetaraan gender, maka hal ini akan mendorong partisipasi aktif perempuan penerima manfaat. Di sisi lain, kepentingan pribadi juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Perempuan penerima manfaat program pemberdayaan tentu akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi jika program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan keterampilan, penghasilan dan kesejahteraan mereka secara individual.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau menyatakan bahwa :

Saya selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap partisipasi saya, terutama dalam kegiatan sosial, untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan umum, saya mencoba untuk terlibat dalam kegiatan yang tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga memberikan nilai tambah untuk diri saya, seperti mengembangkan keterampilan baru atau memperluas jaringan sosial.”<sup>118</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau mengatakan bahwa :

Penting untuk selalu mempertimbangkan kepentingan umum saat berpartisipasi dalam kepentingan sosial. Menyeimbangkan kepentingan pribadi dan umum bagi saya adalah tentang menemukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Saya dapat merasa terpenuhi secara pribadi sambil tetap memberi manfaat kepada orang lain.”<sup>119</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau mengatakan bahwa :

Kepentingan umum harus menjadi prioritas dalam setiap tindakan, saya berusaha untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh komunitas sebelum mengambil keputusan. Untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan umum, saya mencari cara untuk berkontribusi tanpa mengorbankan waktu dan energi yang juga saya butuhkan untuk keluarga dan diri sendiri, karena saya memilih kegiatan yang fleksibel dan bisa dilakukan secara paruh waktu.”<sup>120</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lidia, Ibu Yuyun dan Ibu Bina memberikan gambaran yang menarik tentang pemahaman mereka terhadap keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum. Meskipun memiliki katar belakang yang berbeda,

---

<sup>118</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>119</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>120</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

tetapi memiliki kesamaan dalam menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas dalam partisipasi sosial mereka. Mereka menyadari bahwa kontribusi mereka tidak hanya berdampak pada orang lain, tetapi juga memberikan kepuasan pribadi. Ibu Lidia menekankan pentingnya pengembangan diri melalui kegiatan sosial, sementara Ibu Yuyun lebih fokus pada penyesuaian kegiatan dengan kebutuhan pribadi dan komunitas. Di sisi lain, Ibu Bina menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam berpartisipasi agar tidak mengorbankan peran sebagai anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan penerima manfaat memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab sosial dan mampu menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kebutuhan komunitas.

#### **g. Organisasi, Keputusan rasional dan Efisiensi Usaha**

Dalam menilai partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha. Organisasi yang baik, dengan proses pengambilan keputusan yang rasional dan efisien, akan memudahkan perempuan untuk terlibat dan berkontribusi secara aktif. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang teratur, serta perencanaan dan evaluasi yang sistematis. Selain itu, keputusan-keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan efisien.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau mengatakan bahwa :

Saya menilai bahwa organisasi dan pengelolaan kegiatan sosial di masyarakat cukup baik, terutama program pemberdayaan perempuan, terkadang saya merasa bahwa beberapa keputusan yang diambil bisa lebih transparan.”<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup>Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau mengatakan bahwa :

Organisasi kegiatan sosial kami berjalan dengan baik. Tim pengelola sangat responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan mereka sering mengadakan evaluasi setelah kegiatan. Keputusan yang diambil umumnya rasional dan efisien, karena mereka mempertimbangkan masukan peserta dan melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan. Ini membuat saya merasa terlibat dan didengarkan.”<sup>122</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau mengatakan bahwa :

Pengelolaan kegiatan sosial di masyarakat masih memiliki kendala. Meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat, saya merasa bahwa beberapa keputusan tidak selalu mempertimbangkan masukan dari semua pihak. Dalam beberapa pertemuan, keputusan yang diambil kurang efisien dan berharap ke depannya proses pengambilan keputusan bisa lebih transparan.”<sup>123</sup>

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan perempuan di pengaruhi oleh persepsi mereka terhadap organisasi dan peneglolalaan kegiatan sosial di masyarakat. Ibu Lidia, mengakui bahwa program pemberdayaan perempuan berjalan dengan baik, tetapi mengharapkan transparansi lebih dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, Ibu Yuyun menilai bahwa tim pengelola responsive dan melibatkan masukan peserta. Namun, Ibu Bina mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan, dimana beberapa keputusan tidak mempertimbangkan masukan dari semua pihak, sehingga mengurangi efisiensi. Meskipun ada pengakuan terhadap kemajuan dalam program pemberdayaan, kebutuhan akan transparansi dalam pengambilan keputusan tetap menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan secara efektif.

---

<sup>122</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>123</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

### **f. Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Pengambilan Keputusan**

Musyawarah untuk mufakat adalah proses pengambilan keputusan yang berbasis pada diskusi dan konsensus bersama di antara para peserta. Bagi perempuan penerima manfaat dari program pemberdayaan perempuan, metode ini berarti setiap suara dan pendapat dihargai dan dipertimbangkan sebelum mencapai keputusan yang disepakati bersama. Melalui musyawarah, perempuan dapat berbagi pandangan, menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka, serta memberikan kontribusi terhadap solusi yang akan diambil. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan terhadap aspirasi seluruh anggota, dapat mendukung partisipasi aktif perempuan dan mempertkuat rasa kepemilikan terhadap hasil keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau menyatakan, bahwa :

Proses musyawarah dan pengambilan keputusan dalam program ini, sudah cukup baik. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, saran dan kebutuhan kami, terkadang masih ada beberapa peserta yang kurang aktif dalam berpendapat.<sup>124</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau menyatakan bahwa :

Program pemberdayaan yang saya ikuti, kami selalu diundang untuk memberikan pendapat dan saran. Saya merasa begitu dihargai ketika suara saya didengar, dan ini meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Keputusan diambil secara bersama-sama.<sup>125</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau menyatakan bahwa :

Program pemberdayaan yang saya ikuti, kami selalu diundang untuk memberikan pendapat dan saran. Saya merasa begitu dihargai Ketika

<sup>124</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>125</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

suara saya didengar, dan ini meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Keputusan diambil secara bersama-sama.”<sup>126</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau menyatakan bahwa :

Kami berkumpul untuk berdiskusi, kami saling berbagi pandangan dan menemukan solusi yang lebih kreatif, saya juga melihat dan merasakan bahwa tidak semua musyawarah berjalan dengan lancar, terkadang ada yang mendominasi pembicaraan. Walaupun begitu, jika dilakukan dengan baik, musyawarah dapat menghasilkan keputusan yang sangat bermanfaat bagi semua pihak.”<sup>127</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lidia, Ibu Yuyun dan Ibu Bina mengungkapkan bahwa proses musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan di Kota Parepare. Ibu Lidia menilai bahwa meski proses musyawarah sudah cukup baik, ada beberapa peserta yang kurang aktif berpendapat. Ibu Yuyun merasa dihargai ketika suaranya didengar yang dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program. Sementara itu, Ibu Bina mengamati bahwa meskipun musyawarah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat, terkadang ada kendala berupa dominasi dalam pembicaraan, meskipun perlu ada upaya untuk memastikan partisipasi yang lebih merata dan efektif dari semua pihak.

### i. Kepekaan dan Ketanggapan Masyarakat

Kepakaan dan ketanggapan masyarakat dalam konteks partisipasi perempuan penerima manfaat program pemberdayaan mengacu pada kemampuan dan kesadaran para perempuan untuk memahami, mengidentifikasi dan merespon berbagai masalah sosial ekonomi di lingkungan mereka. Kepakaan mencerminkan tingkat pemahaman terhadap isu, tantangan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, termasuk masalah

<sup>126</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>127</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan ketepatan dalam mengambil tindakan atau memberikan respon terhadap masalah-masalah tersebut.

Dalam program pemberdayaan perempuan, kepekaan dan ketanggapan ini menjadi sangat penting karena mencerminkan sejauh mana para perempuan penerima manfaat tidak hanya mampu mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, tetapi juga aktif mencari solusi dan berkontribusi dalam upaya penyelesaiannya. Hal ini termasuk kemampuan mereka dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan komunitas, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengimplementasikan program-program yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Tingkat kepekaan dan ketanggapan yang tinggi menunjukkan bahwa program pemberdayaan telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas perempuan dalam masyarakat, tidak hanya sebagai penerima manfaat pasif, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pembangunan komunitas mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau menyatakan bahwa :

Masalah sosial ekonomi di lingkungan saya sangat peka, saya sering melihat perempuan berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Banyak dari kami bersedia saling membantu, baik melalui kelompok diskusi maupun program pemberdayaan yang ada, kami peduli dan ingin berkontribusi untuk perbaikan kondisi bersama.”<sup>128</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau menyatakan bahwa :

Berusaha untuk tanggap terhadap masalah sosial ekonomi terutama yang berdampak pada perempuan dan keluarga. Saya merasa bahwa banyak perempuan di komunitas yang menghadapi tantangan dalam hal pendapatan. Kami sering berkumpul untuk membahas cara-cara untuk saling mendukung dan memperbaiki situasi.”<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>129</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau menagtakan bahwa :

Kedulian perempuan terhadap kebutuhan dan kepentingan umum sangat penting dan banyak yang aktif berpartisipasi dalam upaya memperjuangkan hak dan kebutuhannya yang terlihat bahwa kami tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga kepada sesama.”<sup>130</sup>

Dari hasil wawancara diatas dengan tiga perempuan penerima manfat program pemberdayaan perempuan di Kota Parepare, menunjukkan bahwa tingkat kepekaan dan ketanggapan perempuan terhadap masalah sosial ekonomi di lingkungan mereka sangat tinggi. Ketiga informan ini, menggambarkan bahwa program pemberdayaan perempuan telah berhasil membangun kesadaran kolektif dan solidaritas sosial diantara para penerima manfaat.

### **3. Minimnya Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan Setelah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Parepare.**

Setelah dilaksanakannya program pemberdayaan perempuan, perubahan yang signifikan dalam partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare dapat diketahui dari program-program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kepercayaan diri perempuan dalam berbagai peluang baru bagi mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi sosial.

#### **1. Kesempatan Untuk Berpartisipasi**

Penting untuk mengevaluasi sejauh mana peremuan telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pemberdayaan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pemeliharaan dan pemanfaatan program. Menilai efektivitas partisipasi perempuan dalam setiap tahap ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana program pemberdayaan telah memberikan manfaat nyata bagi perempuan penerima manfaat. Partisipasi di

---

<sup>130</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

setiap Langkah dapat memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi perempuan, serta meningkatkan keberlanjutan program.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang), beliau menyatakan bahwa :

Saya rasa belum memberikan kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Saya hanya dilibatkan sebatas pelaksanaan di lapangan, tapi tidak pernah diajak untuk mengambil keputusan atau terlibat dalam perencanaan, padahal kami inilah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan di lingkungan kami.”<sup>131</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau menyatakan bahwa :

Menurut saya, sudah berusaha melibatkan, terutama dalam tahap pelaksanaan dan pemeliharaan program pemberdayaan perempuan. Namun, keterlibatan saya masih terbatas. Saya jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Sebaiknya lebih membuka kesempatan bagi saya, terutama bagi perempuan biar aktif dalam seluruh tahapan.”<sup>132</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau menyatakan bahwa :

Bagi saya sudah cukup memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Walaupun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan tapi secara tahapan itu, saya merasa bisa menyuarakan suara saya.”<sup>133</sup>

Dari hasil wawancara dengan para perempuan penerima manfaat program pemberdayaan perempuan, terlihat adanya variasi pandangan mengenai efektivitas keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan perempuan. Ibu Lidia

<sup>131</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>132</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>133</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

mengungkapkan ketidakpuasan kerana keterlibatannya sebatas pelaksanaan di lapangan. Ibu Yuyun mengakui bahwa meskipun sudah ada upaya pelibatan dalam tahap pelaksanaan dan pemeliharaan program, keterlibatannya masih terbatas dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan. Ibu Bina merasa sudah cukup memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi. Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program pemberdayaan perempuan masih perlu di tingkatkan, meskipun sudah ada upaya positif dalam melibatkan mereka pada tahap pelaksanaan.

Keterlibatan perempuan dalam program pemberdayaan bergantung pada aksebilitas informasi. Seberapa jelas dan mudah dipahami infromasi mengenai kapan dan bagaimana cara berpartisipasi dalam program ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau menyatakan bahwa :

Saya selalu mendapatkan undangan dan informasi mengenai rapat-rapat atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Diberitahukan jadwal dan agenda rapatnya, sehingga bisa menyesuaikan waktu untuk hadir dan berpartisipasi.”<sup>134</sup>

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa salah satu aspek yang mendukung partisipasi perempuan sebagai penerima manfaat dalam mengikuti program pemberdayaan perempuan adalah adanya informasi dan undangan yang jelas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengelola program telah berusaha untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada perempuan penerima manfaat, sehingga memungkinkan mereka untuk menyesuaikan waktu dan berpartisipasi secara aktif.

Selain informasi yang jelas mengenai kegiatan program pemberdayaan perempuan, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap peralatan atau perlengkapan penunjang juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi partisipasi

---

<sup>134</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

perempuan penerima manfaat. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yuyun (Penjahit) melalui wawancara, beliau mengatakan bahwa :

Saya merasa bahwa ketersediaan dan kemudahan akses terhadap peralatan serta perlengkapan penunjang masih perlu ditingkatkan, karena jumlahnya terbatas.”<sup>135</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan dalam program masih terbatas. Hal ini menyebabkan Ibu Yuyun (Penjahit) harus bergantian menggunakanannya. Kondisi ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk terlibat secara aktif, karena mereka menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Selain itu, jika perempuan harus membawa peralatan sendiri dari rumah, hal ini dapat menimbulkan beban tambahan bagi mereka. Mereka mungkin harus menyediakan waktu dan biaya ekstra untuk mempersiapkan peralatan tersebut, sehingga dapat mengurangi partisipasi mereka dalam mengikuti program.

Akses terhadap peralatan yang memadai dapat mendukung perempuan dalam mengembangkan keterampilan dan menjalankan aktivitas dalam program pemberdayaan. Namun, partisipasi mereka juga akan lebih efektif jika didukung oleh adanya kebebasan dan kesempatan untuk berorganisasi secara mandiri. Melalui organisasi yang dikelola sendiri, perempuan penerima manfaat dapat memiliki ruang untuk saling bertukar informasi dan berkolaborasi mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), menyatakan bahwa :

Saya merasa memiliki kebebasan untuk berorganisasi, namun kesempatan untuk berpartisipasi masih terbatas. Program pemberdayaan memberikan wadah bagi saya dan perempuan lainnya, tetapi pekerjaan sering membuat saya tidak hadir di setiap pertemuan.”<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>136</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Bina, menggambarkan bahwa meskipun sudah merasa memiliki kebebasan untuk berorganisasi dan diberikan ruang pada program pemberdayaan, kesempatan untuk berpartisipasi masih terbatas akibat kendala lain, seperti pekerjaan. Ketidakmampuan untuk hadir disetiap pertemuan menunjukkan bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi aktif mereka. Hal ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam jadwal dan metode pelaksanaan program pemberdayaan agar perempuan dapat lebih mudah menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan partisipasi dalam program.

## 2. Kemampuan Untuk Berpartisipasi

Kemampuan untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan perempuan merupakan indikator penting dalam menilai dampak program tersebut terhadap kualitas hidup penerima manfaat. Dengan memahami sejauh mana program ini dapat meningkatkan aspek pekerjaan dan pendapatan bagi perempuan, kita dapat mengetahui hubungan antara peningkatan mutu hidup dan tingkat partisipasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidia (Pedagang Kecil), beliau menyatakan bahwa :

Saya merasakan adanya peningkatan dalam kualitas hidup saya, terutama dari segi pekerjaan dan pendapatan. Sebelumnya, saya belum memiliki penghasilan sendiri. Melalui program pelatihan keterampilan dan berbagai pelatihan kewirausahaan, membantu saya untuk mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan di rumah, saat ini saya memiliki tambahan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”<sup>137</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau menyatakan bahwa :

Peningkatan kualitas hidup khususnya dari segi pekerjaan dan pendapatan, masih belum optimal, saya memang mendapatkan berbagai

---

<sup>137</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

pelatihan keterampilan yang bermanfaat. Namun, saya masih kesulitan untuk mengembangkan usaha-usaha kecil secara mandiri setelah mengikuti program ini. Saya membutuhkan dukungan dan pendampingan yang lebih intensif.”<sup>138</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau menyatakan bahwa :

Program pemberdayaan ini memberikan saya kesempatan untuk belajar. Sebelumnya saya tidak memiliki keahlian khusus dan pendapatan saya sangat rendah. Setelah mengikuti program, saya kini mendapatkan pekerjaan sebagai pramuniaga dan bisa berkontribusi kepada keluarga.”<sup>139</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa perempuan penerima manfaat program pemberdayaan perempuan, dapat dilihat adanya dampak positif yang dirasakan oleh mereka, khussnya dalam meningkatkan kualitas hidup dari segi pekerjaan dan pendapatan. Hasil wawancara ini menggambarkan berbagai dampak dari partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan yang berfokus pada pelatihan keterampilan. Ibu Lidia merasakan peningkatan signifikan dalam pekerjaan dan pendapatan setelah mengikuti oelatihan kewirausahaan, sedangkan Ibu Yuyun masih merasa peningkatan tersebut belum optimal dan membutuhkan dukungan lebih lanjut. Sementara itu, Ibu Bina berhasil memperoleh pekerjaan sebagai pramuniaga setelah mengikuti program, sehingga dapat berkontribusi lebih baik bagi keluargamya. Dengan fokus pada memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dapat memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial perempuan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembeberdayaan perempuan yaitu memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan berdaya saing di berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>138</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>139</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

Peningkatan kualitas hidup dari segi pekerjaan dan pandapatan yang dirasakan oleh para perempuan penerima manfaat, erat kaitannya dengan kemampuan mereka dalam mengikuti dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan. Kemampuan ini sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau menyatakan bahwa :

Saya melihat bahwa pendidikan dan keterampilan sangat penting dalam keberhasilan program pemberdayaan perempuan. Pendidikan memberikan pemahaman kepada saya yang lebih luas tentang kebutuhan yang dihadapi. Keterampilan memungkinkan saya untuk menciptakan suatu kerajinan. Saya merasa memiliki akses ke pelatihan keterampilan yang meningkatkan kemampuan saya.”<sup>140</sup>

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Bina (Pramuniaga) dalam wawancara yang telah dilakukan, beliau mengatakan bahwa :

Dari pengalaman saya, kemampuan dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Meskipun saya memiliki keterampilan dasar, saya menyadari pendidikan formal dapat membuka lebih banyak peluang. Saya berusaha terus untuk belajar, baik melalui program-program yang ada maupun dari pengalaman sehari-hari.”<sup>141</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan penerima manfaat berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam melaksanakan program pemberdayaan. Ibu Yuyun, menyatakan bahwa Pendidikan memberikan pemahaman yang lebih luas sedangkan keterampilan memungkinkan untuk menciptakan suatu kerajinan. Ibu Bina juga menyatakan bahwa sebagai seorang yang hanya memiliki keterampilan dasar, menyadari bahwa Pendidikan formal dapat membuka lebih banyak peluang baginya. Oleh karena itu, Ibu Bina berusaha terus belajar, baik melalui program-program yang

---

<sup>140</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>141</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

ada maupun dari pengalaman sehari-hari. Dari kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik cenderung dapat mengikuti program dengan lebih baik dan memanfaatkan pelatihan yang diberikan untuk mengembangkan usaha atau pekerjaan mereka. Dengan memahami kemampuan awal peserta, program dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efektif, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan kualitas hidup.

Program pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meningkatkan kemampuan peserta dalam memecahkan masalah secara mandiri. Program pemberdayaan diharapkan dapat membekali peserta dengan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi dan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta bagaimana berdampak pada partisipasi aktif mereka dalam program. Pernyataan ini sesuai dengan wanacara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau menyatakan bahwa :

Memberikan banyak wawasan tentang cara memecahkan masalah secara mandiri, dengan pengetahuan yang saya dapatkan, saya lebih mampu mencari solusi. Apabila saya mengalami penurunan pendapatan, saya biasanya memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.”<sup>142</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai dampak positif program pemberdayaan terhadap kemampuannya dalam memecahkan masalah dan meningkatkan partisipasinya. Program pemberdayaan telah memberikan Ibu Yuyun pengetahuan dan keterampilan yang mengembangkan kemampuan kritis, Ibu Yuyun tidak hanya pasif dalam menerima masalah, tetapi aktif mencari solusi yang inovatif dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk memperluas jangkauan

---

<sup>142</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Yuyun mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif.

### **3. Kemauan Untuk berpartisipasi**

Kemauan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sosial di lingkungannya merupakan faktor penting yang menentukan tingkat partisipasi mereka dalam program pemberdayaan perempuan. Kemauan ini dapat dilihat dari sikap kemandirian dan kepercayaan diri atas kemampuan mereka untuk memperbaiki kualitas hidup, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.

Berdasarkan wancara yang dilakukan dengan Ibu Lidia (Penjahit), beliau menyatakan bahwa :

Saya mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan saya ini dan merasa mampu untuk memperbaiki kualitas hidup saya sendiri.”<sup>143</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuyun (Penjahit), beliau menyatakan bahwa:

Saya belajar bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan usaha yang tepat. Kemandirian saya terlihat ketika saya memulai mengambil keputusan dalam usaha saya, seperti mencari cara baru untuk meningkatkan pendapatan.”<sup>144</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bina (Pramuniaga), beliau menyatakan bahwa :

Program ini memberikan saya banyak pengetahuan, keterampilan dan kegiatan baru yang membuat saya semakin dapat memampukan diri. Sekarang saya terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, seperti mengikuti pertemuan warga, arisan.”<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Ibu Lidia, Pedagang Kecil, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>144</sup> Ibu Yuyun, Penjahit, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

<sup>145</sup> Ibu Bina, Pramuniaga, wawancara di Kota Parepare, 21 November 2024.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lidia, Ibu Yuyun dan Ibu Bina menunjukkan perkembangan positif dalam sikap kemandirian dan kepercayaan diri mereka sebagai penerima manfaat program pemberdayaan perempuan. Ibu Lidia mengungkapkan bawa kini mampu mengembangkan usaha kecilnya dan merasa lebih berdaya dalam meperbaiki kualitas hidupnya. Ibu Yuyun menambahkan bahwa, beliau belajar mengatasi tantangan dengan usaha yang tepat dan kini lebih mandiri dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan pendapatannya. Sementara itu, Ibu Bina merasakan manfaat dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang membantunya terlibat di kegiatan sosial di lingkungan sekitar, seperti pertemuan warga dan arisan. Dengan demikian pendampingan dan pelatihan yang tepat dapat memberdayakan perempuan dalam meningkatkan potensi diri dalam menghadapi tantangan.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### **1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menigkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan sesuai dengan teori peran Jim Ife dan frank Tesoriero, terutama dalam peran fasilitatif dan peran edukasi. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare berperan sebagai penggerak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan. Melalui berbagai inisiatif, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare berupaya memberdayakan perempuan agar memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial maupun ekonomi.

Salah satu strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Setiap tahun, program-program yang ditawarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare selalu disesuaikan dengan

kebutuhan dan tantangan terkini yang dihadapi perempuan di Kota Parepare. Fleksibilitas ini sangat penting karena kebutuhan perempuan selalu dinamis dan terus mengalami perubahan. Dengan demikian, program-program yang ditawarkan oleh DP3A Kota Parepare selalu relevan dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare memiliki tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan secara umum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus kelompok perempuan rentan dan penyandang disabilitas. Dinas Pemrbdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, memastikan bahwa semua perempuan tanpa ada yang termarginalkan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di Kota Parepare.

Sasaran utama program dan kegiatan yang diselenggarakan adalah kelompok rentan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pelatihan yang diselenggarakan di fokuskan untuk memberdayakan perempuan kelompok rentan agar mereka dapat menghadapi berbagai tantangan di lingkungan mereka. Pendekatan ini melibatkan pemberian pelatihan kepada perwakilan perempuan di setiap kecamatan dan kelurahan, Tujuannya agar mereka dapat menyebarkan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota kelompok lainnya.

Memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, anggaram serta sarana dan prasarana untuk mendukung program pemberdayaan perempuan. Pemanfaatan sumber daya yang optimal ini berorientasi pada peningkatan partisipasi sosial ekonomi perempuan secara maksimal. Penggunaan sumber daya secara efisien menjadi kunci dalam menjalankan program dengan keterbatasan anggaran. Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnaK (DP3A) Kota Parepare dapat memberikan dampak positif meskipun menghadapi tantangan sumber daya.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dilakukan secara mandiri dengan mengundang narasumber kompeten di bidangnya menggunakan dana internal. Tidak ada kerja sama pedanaan dengan pihak eksternal untuk pelatihan tersebut. Hal ini menunjukkan fokus pada kualitas pelatihan meskipun keterbatasan anggaran dengan memastikan bahwa materi pelatihan relevan dan sesuai kebutuhan perempuan penerima manfaat di Kota Parepare. Namun, menjadi tantangan dalam memperluas cakupan program.

Upaya konkret Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dalam memberdayakan perempuan adalah melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan kewirausahaan sebagai upaya meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. Program pelatihan mencakup berbagai keahlian, mulai dari mengubah limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi, Selain itu, diberikan juga pelatihan membatik tulis, ecoprint dan daur ulang plastik menjadi kerajinan. Variasi pelatihan ini di rancang untuk memberikan pilihan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. Ini merupakan contoh nyata dari upaya DP3A Kota Parepare dalam meningkatkan kemampuan diri perempuan. Dengan memiliki keterampilan yang memadai, perempuan dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki peran aktif dalam masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare adalah mindset masyarakat yang masih terikat pada norma sosial dan budaya patriarki, Norma sosial tersebut membatasi peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, Meski dukungan program sudah ada, pengaruh norma sosial yang membatasu sering kali menghalangi partisipasi perempuan. Oleh karena itu, perlunya pemberian edukasi sebagai langkah penting untuk megubah pola pikir masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar perempuan mau berperan aktif dan berkontribusi dalam program pemberdayaan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare melakukan identifikasi isu gender secara menyeluruh sebagai tahap awal perumusan program pemberdayaan. Identifikasi ini membantu memotret permasalahan yang dihadapi perempuan di Kota Parepare secara konkret. Dari hasil identifikasi, dilakukan penetuan solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang diharapkan adalah terciptanya akses dan keterlibatan bagi semua gender, termasuk penyandang disabilitas, sehingga tidak ada kelompok yang termarginalkan dalam proses pemberdayaan.

Program Pemberdayaan perempuan di Kota Parepare berbasis regulasi yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah (SKPD) yang mengatur isu gender yang berfungsi untuk memahami tantangan dan merancang program yang relevan. Proses ini melibatkan identifikasi isu, pemetaan dan implementasi solusi secara terstruktur. Dengan pendekatan ini, program pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare menjalankan peran yang komprehensif dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare. Melalui analisis isu gender, pelatihan kewirausahaan, pemberian edukasi dan pengelolaan sumber daya yang optimal, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare berupaya memberdayakan perempuan, meskipun menghadapi tantangan budaya patriarki dan keterbatasan anggaran, upaya kolaboratif dan penyesuaian strategi dilakukan agar pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan dan peran sosial ekonomi perempuan.

Peningkatan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Ketika perempuan diberdayakan, mereka tidak hanya berkontribusi pada ekonomi keluarga, tetapi juga pada masyarakat. Pemberdayaan perempuan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan

meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, dukungan terhadap program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dengan adanya kolaborasi tujuan pemberdayaan perempuan dapat tercapai.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan di Kota Parepare**

Dalam upaya meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare, pelaksanaan program pemberdayaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Hasil wawancara dengan tiga perempuan penerima manfaat program pemberdayaan, yaitu Ibu Lidia, Ibu Yuyun dan Ibu Bina, menggunakan berbagai aspek penting terkait keterlibatan perempuan dalam proses pemberdayaan, menurut Holil<sup>146</sup>, unsur-unsur yang mempengaruhi masyarakat.

### **a. Keyakinan Diri**

Keyakinan diri yang dimiliki oleh perempuan penerima manfaat program pemberdayaan dapat memotivasi dan mendorong keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Dukungan dari keluarga, teman-teman dan pengalaman positif orang lain yang telah berpartisipasi menjadi faktor yang meningkatkan keyakinan diri mereka untuk terlibat dalam program pemberdayaan.

### **b. Solidaritas dan Integritas Sosial Masyarakat**

Hubungan sosial dan tingkat solidaritas yang baik di antara perempuan penerima manfaat program pemberdayaan menciptakan rasa saling mendukung dan terhubung, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan-

---

<sup>146</sup> Holil Soelaiman, *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, 1980). h. 9-10.

kegiatan komunitas. Pertemuan rutin dan interaksi yang erat membantu meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan diri mereka untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan, serta berusaha untuk menjangkau perempuan lain yang belum mendapatkan akses ke program, yang pada gilirannya memperkuat jaringan sosial mereka,

**c. Tanggung Jawab Sosial dan Komitmen dari Masyarakat**

Adanya kesadaran dan tanggung jawab sosial yang kuat di antara para penerima manfaat program pemberdayaan, mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam upaya perbaikan kondisi masyarakat. Hal ini tercermin dari pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu sosial dan komitmen yang tinggi yang menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya oeran mereka dalam perubahan sosial.

**d. Kemauan dan Kemampuan Untuk Mengubah atau Memperbaiki Keadaan dan Membangun Atas Kekuatan Sendiri**

Program pemberdayaan perempuan telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kemauan pesertanya untuk berpartisipasi pada perubahan positif di masyarakat. Melalui pengembangan keterampilan, pengetahuan dan kesadaran akan potensi diri, para perempuan penerima manfaat merasa mampu dan termotivasi untuk terlibat aktif dalam upaya perbaikan kondisi di lingkungan mereka.

**e. Prakarsa Masyarakat**

Inisiatif yang diambil oleh perempuan penerima manfaat program pemberdayaan, baik di tingkat komunitas maupun di masyarakat luas, menunjukkan adanya rasa kepemilikan, motivasi dan keberdayaan mereka untuk terlibat aktif. tanggapan positif dari masyarakat terhadap prakarsa yang diajukan menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi perempuan.

**f. Kepentingan Umum**

Perempuan penerima manfaat program pemberdayaan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menyeimbangkan kepentingan pribadi

dan kepentingan umum. Mereka berusaha untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas.

#### **g. Organisasi, Keputusan rasional dan Efisiensi Usaha**

Organisasi yang baik dengan proses pengambilan keputusan yang rasional dan efisien akan memudahkan perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif. Transparansi dan pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan menjadi harapan para perempuan penerima manfaat untuk meningkatkan partisipasi mereka.

#### **h. Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Pengambilan Keputusan**

Proses musyawarah dan pengambilan keputusan secara bersama-sama memberikan kesempatan bagi perempuan penerima manfaat untuk menyuarakan aspirasi, kebutuhan dan tantangan mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil keputusan dan mendorong partisipasi aktif mereka.

#### **i. Kepekaan dan Ketanggapan Masyarakat**

Tingkat kepekaan dan ketanggapan perempuan penerima manfaat program pemberdayaan terhadap masalah sosial ekonomi di lingkungan mereka menunjukkan bahwa program tersebut telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas mereka sebagai agen perubahan yang aktif dalam upaya perbaikan kondisi masyarakat.

### **3. Minimnya Partisipasi sosial ekonomi perempuan setelah pemberdayaan perempuan di Kota Parepare**

Partisipasi sosial ekonomi perempuan dalam program pemberdayaan merupakan suatu proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Margono Slamet menjelaskan bahwa partisipasi dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu ksempatan untuk berpartisipasi, kemampuan untuk berpartisipasi dan kemauan

untuk berpartisipasi<sup>147</sup>. Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan penerima manfaat (Ibu Lidia, Ibu Yuyun dan Ibu Bina), ketiga aspek tersebut dapat dilihat dalam konteks program pemberdayaan perempuan di Kota Parepare. Kesempatan untuk berpartisipasi mengacu pada sejauh mana perempuan dilibatkan dalam seluruh tahapan program, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kemampuan untuk berpartisipasi terkait dengan dampak program terhadap peningkatan kualitas hidup mereka, khususnya dari segi pekerjaan dan pendapatan. Sementara itu, kemauan untuk berpartisipasi dapat dilihat dari sikap kemandirian dan kepercayaan diri perempuan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup mereka.

### 1) Kesempatan Untuk Berpartisipasi

Keterlibatan perempuan dalam seluruh tahapan program pemberdayaan menunjukkan adanya variasi pandangan di kalangan perempuan penerima manfaat. Ibu Lidia merasa belum optimal diberikan kesempatan untuk terlibat dalam tahapan program pemberdayaan, sementara Ibu Yuyun dan Ibu Bina merasa bahwa mereka sudah cukup dilibatkan, meski masih ada ruang untuk perbaikan. Hal ini menyoroti perlu adanya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi secara aktif di setiap tahapan program yang dapat meningkatkan efektivitas program tersebut.

Untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategis yang tepat sasaran, diperlukan analisis mendalam terhadap pola partisipasi perempuan di setiap tahapan program. Setiap tahapan partisipasi program pemberdayaan memiliki tantangan dan peluang yang berbeda bagi keterlibatan perempuan penerima manfaat. Dengan memahami dinamika partisipasi pada masing-masing tahapan, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi, dapat

---

<sup>147</sup> Aprilia Theresia et al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 207.

diidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tahapan partisipasi yang mencerminkan dinamika keterlibatan perempuan dalam implementasi program pemberdayaan, meliputi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi program, antara lain :

#### **a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perlu ditingkatkan. Meskipun program ini telah berupaya melibatkan perempuan penerima manfaat, keterlibatan mereka cenderung lebih dominan pada tahap implementasi daripada tahap pengambilan keputusan. Hal ini membuat program tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan kaum perempuan penerima manfaat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka sejak tahap awal, karena mereka yang paling memahami kondisi di lapangan.

#### **b. Partisipasi dalam Pelaksanaan**

Para perempuan penerima manfaat lebih banyak terlibat dalam tahap pelaksanaan program. Mereka mendapat undangan tentang jadwal dan kegiatan sehingga bisa menyesuaikan waktu untuk hadir dan berpartisipasi. Namun, kekerasan sarana dan prasarana yang terbatas menjadi kendala yang dapat mengurangi partisipasi mereka dalam suatu kegiatan.

#### **c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat**

Partisipasi dalam pengambilan manfaat terkait dengan akses terhadap hasil program. Wawancara dengan perempuan penerima manfaat menunjukkan bahwa perempuan mengharapkan akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan

sumber daya yang disediakan. Program pemberdayaan perlu memastikan bahwa setiap peserta dapat merasakan manfaat secara langsung yang akan meningkatkan partisipasi mereka untuk terlibat lebih lanjut.

#### **d. Partisipasi dalam Evaluasi**

Keterlibatan perempuan penerima manfaat dalam evaluasi masih kurang optimal dalam memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program pemberdayaan. Untuk meningkatkan keberlanjutan program diperlukan mekanisme evaluasi yang melibatkan perempuan secara aktif, sehingga program yang responsif terhadap aspirasi dari perempuan akan lebih mampu menjawab kebutuhan mereka dan meningkatkan keberlanjutan.

#### **2) Kemampuan Untuk berpartisipasi**

Kemampuan untuk berpartisipasi merupakan indikator dari dampak program pemberdayaan terhadap kualitas hidup perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, perempuan penerima manfaat yaitu Ibu Lidia dan Ibu Bina merasakan peningkatan dalam pekerjaan dan pendapatan setelah mengikuti program berkat pelatihan keterampilan yang diberikan. Namun, Ibu Yuyun merasa masih memerlukan pendampingan tambahan untuk dapat mengembangkan usaha secara mandiri. Peningkatan kualitas hidup terkait erat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memanfaatkan pelatihan dan mengidentifikasi peluang ekonomi.

#### **3) Kemauan Untuk Berpartisipasi**

Kemauan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan. Perempuan penerima manfaat menunjukkan perkembangan positif dalam sikap kemandirian dan kepercayaan diri mereka, dari mulai mengambil Langkah aktif dalam usaha kecil dan terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, seperti arisan dan mengikuti pertemuan

warga. Dukungan melalui pelatihan dan pengetahuan yang diperoleh dari program membuat mereka merasa lebih mampu dan berdaya, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengatasi tantangan dan memperbaiki kualitas hidup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare adalah instansi pemerintahan yang memiliki peranan krusial dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan melalui program-program pemberdayaan perempuan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan. Dengan pendekatan yang berbasis gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare telah mencapai keberhasilan dalam memberdayakan kaum perempuan melalui pelatihan, pendampingan dan kolaborasi dengan berbagai organisasi. Selain itu, penyesuaian program setiap tahun yang dilakukan sesuai dengan tantangan yang dihadapi perempuan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai kesetaraan gender. Upaya untuk meningkatkan mutu program dan memperluas kolaborasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dapat lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi perempuan di Kota Parepare.
2. Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Parepare dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Program pemberdayaan perempuan di Kota Parepare memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan. Beberapa faktor pendukung, seperti keyakinan diri, solidaritas sosial, tanggung jawab sosial dan kemauan untuk berpartisipasi, berperan penting dalam mendorong keterlibatan perempuan. Selain itu, prakarsa masyarakat, khususnya dari perempuan penerima manfaat yang mendapat tanggapan positif menjadi faktor pendukung. Perempuan penerima manfaat juga memiliki kesadaran akan pentingnya menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam berpartisipasi. Namun, masih terdapat

tantangan yang harus diatasi, seperti perlunya keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan dan penguatan organisasi. Proses musyawarah untuk mufakat juga diharapkan dapat lebih merata agar semua aspirasi perempuan didengar. Dengan meningkatkan dukungan dan mengatasi hambatan-hambatan ini, program pemberdayaan perempuan dapat lebih efektif dalam memberdayakan perempuan dan menciptakan perubahan positif bagi dirinya sendiri dan di masyarakat.

3. Partisipasi sosial ekonomi perempuan setelah program pemberdayaan di Kota Parepare, ditemukan bahwa program ini memberikan dampak bervariasi pada tiga aspek utama. Dari segi kesempatan berpartisipasi, masih terdapat keterbatasan dalam pelibatan perempuan pada tahap pengambilan keputusan dan perencanaan, meskipun sudah cukup baik dalam tahap pelaksanaan. Dalam hal kemampuan berpartisipasi, mayoritas perempuan penerima manfaat mengalami peningkatan kualitas hidup melalui bertambahnya pendapatan dan keterampilan baru, walaupun masih ada yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Sementara itu, aspek kemauan berpartisipasi, program ini berhasil meningkatkan kemandirian dan kepercayaan perempuan penerima manfaat, yang tercermin dari keaktifan mereka dalam mengembangkan usaha dan terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, meskipun masih diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

## B. Saran

### **1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare agar lebih meningkatkan cakupan dan jenis pelatihan yang diberikan kepada perempuan penerima manfaat. Pelatihan merupakan salah satu komponen penting dalam program pemberdayaan, yang dapat membantu meningkatkan

kemampuan dan keterampilan perempuan dan perlu melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan secara lebih mendalam dengan perempuan penerima manfaat untuk mengetahui jenis keterampilan apa yang paling mereka butuhkan sesuai kondisi dan potensi lokal yang ada di Kota Parepare. Memberikan pendampingan yang lebih intensif pasca pelatihan kepada perempuan penerima manfaat dalam menerapkan keterampilan yang di peroleh untuk mengembangkan usaha mereka. Pendampingan ini akan membantu memastikan bahwa pelatihan yang diberikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup perempuan.

## **2. Pemerintah Kota Parepare**

Memastikan perempuan penerima manfaat terlibat secara aktif dalam semua tahap program pemberdayaan. Keterlibatan perempuan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan. Dapat memulai dengan membuka ruang diskusi dan forum konsultasi dengan perempuan penerima manfaat. Hal ini akan memberi kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi yang dihadapi secara langsung. Masukan dari perempuan penerima manfaat tersebut dapat dijadikan dasar dalam Menyusun rancangan program pemberdayaan yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Upaya pelibatan perempuan dalam setiap tahapan program pemberdayaan ini agar meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap program. Hal ini pada akhirnya akan mendorong partisipasi yang lebih baik dan berdampak bagi peningkatakan kualitas hidup perempuan di Kota Parepare.

## **3. Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti menggunakan metode campuran yang menggunakan variable lain dalam meneiliti partisipasi dalam program pemberdayaan dengan mempertimbangkan beberapa variable yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Dengan menggabungkan kedua metode

ini, peneliti selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika partisipasi perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Alamsyahbana, Muhammad Isa, Aulia Dewi Gizta, Putri Dwi Novrina, Raja Yulianita Sarazwati, Selvi Fauzar, Vanisa Meifari, Novica Indriaty, et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023.
- Ambler, Kate, kelly Jones, and Michael O'Sullivan. "Facilitating Women's Access To An Economic Empowerment Initiative : Evidence From Uganda." *World Development* 138 (February 1, 2021). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105224>.
- Amri, Khairul, Cut Dian Fitri, Ikhsan Ikhsan, and Sri Rosmiati Sani. "Kontribusi Pendapatan Perempuan Menurunkan Tingkat Kemiskinan Bukti Data Panel Di Provinsi Riau." *Selodang Mayang* 9, no. 3 (2023): 199–205. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.351>.
- Amrizal, M Hery, Darsono Wisadirana, and Sanggar Kanto. "Partisipasi Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)." *Pamator* 9, no. 2 (2016): 95–102. <https://doi.org/10.21107/pamator.v9i2.3373>.
- Amruddin, Ista Leanni Muskanafola, Erna Febriyanti, Atik Badi'ah, Fance Roynaldo Pandie, Maria Yasinta Goa, Yulia Martiningsih. Karmila Letor, et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Bahua, Mohammad Ikbal. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.
- BPS. *Kota Parepare Dalam Angka 2024*. Parepare: Badan Pusat Statistik, 2024.
- BPS. *Statistik Ketenagakerjaan Kota Parepare 2023*. Parepare: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Choudhury, Topu, and Juti Rani Devi. "Empowerment of Women Through Urban Local Governance With Special Reference to Guwahati Municipal Corporation, Assam." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 2 (2022): 4237–44. <http://journalppw.com>.
- Cohen, John, and Norman Uphoff. "Participation's Place in Rural Development : Seeking Clarity Through Specificity." *World Development* 8, no. 3 (1980).

- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Desmayeti, Junriana, and Dwi Aprita. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang Di Desa Batu Berapi Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas." *JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji) STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang* 3, no. 1 (2021): 645–53.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare. "Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2024-2026," 2023.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca, 2018.
- Hayati, Kinanti Resmi, Izzatun Nisak, Amalia Tasya Salsabila Suyanto, and Mahesha Aginio Bimantio. "Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 4, no. 1 (April 29, 2022): 11–16. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i1.457>.
- Ife, Jim, and Frank Tesoriero. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Jamal, Nanang Abdul, and Ahmad Wahyudi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Khaerani, Nalis Siti. "Peran Wanita Dalam Perubahan Sosial Melalui Kepemimpinan Posdaya." *SOSIET Sosietas* 7, no. 1 (2017): 371–75.
- Makruf, Syahdara Anisa, and Fuad Hasyim. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi Di Era Digital." *JUKESHUM* 2, no. 1 (2022): 46–52. <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v2i1.175>.
- Miyayi, Endah Neni, Hanantyo Sri Nugroho, Ferri Wicaksono, and Ardiyati. "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Dinamika* 3, no. 1 (2023): 52–62.
- Muslimin, Dian, Zumhur Alamin, Defirra Alizunna, Risna Nur Ainia, Firza Agung Prakoso, Randitha Missouri, Masita, et al. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*. Sumatera Barat: CV. Lauk Puyu Press, 2024.

- Nuraisah, and Lilis Wahyuni. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Di Kampung Rawa Mekar Jaya." *Share : Social Work Journal* 10, no. 1 (August 9, 2020): 73–82. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Sputra, Dedo Mardianto, Ns. Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup, 2022.
- Purba, Adinda Dilla Ayuningtyas, and Neila Susanti. "Analisis Peran Ganda Perempuan Generasi Sandwich Pada Ruang Publik Dan Domestik Di Kabupaten Batubara." *JISA : Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 7, no. 1 (2024).
- Razali, Geofakta, Ahmad Syamil, Roberta Uron Hurit, Aulia Asman, Lestariningih, Radjawane. Louise Elizabeth, Christina Bagenda, et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023.
- Ridwan. *Perencanaan Partisipatif (Perspektif Kesejahteraan Masyarakat)*. Jawa Timur: CV. R.A.De.Rozarie, 2013.
- Rohma, Ika Nurul Septya, Siti Marwiyah, and Renny Candradewi Pusoitarini. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Batik Tulis Ronggo Mukti Pada Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 9 (July 27, 2022): 1585–94. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.211>.
- Rohmad, Zaini. *Sosiologi Pembangunan*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Rumbekwan, Margaretha, and Nini Adelina Tanamal. "Peran Perempuan Dalam Ketahanan Nasional." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (February 2, 2023): 203–12. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.3081>.
- Sartika, Emilia Nanda, and Ahmad Arif Widianto. "Perempuan Dalam Pemberdayaan Sosial Di Komunitas Pelangi Nusantara Malang." *Dimensia : Jurnal Kajian Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 196–213. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i2.61513>.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sholahuddin, Agus. *Metodologi Penelitian Sosial Perspektif Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: Edulitera, 2021.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Soelaiman, Holil. *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, 1980.
- Soerjono, Soekanto. *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali, 2002.
- Sompie, Maulida Eka Putri, Achmad Aminudin, and Jatmiko Yogopriyatno. "Analisi Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sungai Serut." *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)* 1, no. 3 (2022): 93–102.
- Sophia, Arambam. "Women's Empowerment in Manipur." *The Asian Institute Of Research Journal Of Social and Political Sciences* 4, no. 1 (2021): 25–39. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.247>.
- Suaib. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Subakti, Hani, Roberta Uron Hurit, Genoveva Dua Eni, Marianus Yufrinalis, Sonya Kristiani Maris, Adwiah. Rabiatun, Ahmad Syamil, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanti, Emi Dewi, Nalom Siagian, and Hisar Siregar. "Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Di Kabupaten Nias Selatan." *JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (2023): 106–22. <https://doi.org/10.51622>.
- Susanty, Marisa, Sri Rahayu, and Maya Insani. "Pengaruh Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Berwirausaha Terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir)." *SAMALEWA : Jurnal Riset Dan Kajian Manajemen* 2, no. 1 (2022).
- Sutikno, M. Sobry, and Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica, 2020.
- Tahir, Rusdin, Annisa Fitri Anggraeni, Suyono Thamrin, Maria Lusiana Yulianti, Windi Lestari, Andina Nurul Wahidah, Ainum Jhariah Hidayah, et al. *Metodologi Penelitian (Teori, Masalah Dan Kebijakan)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tapi, Triman, Nini Apriani Rumata, Irwan Kurniawan Soetijono, Mohammad Zubair Hippy, St. Aisyah R, Adi Papa Pandarangga, Andri Pratama, et al. *Pembangunan Desa*. Yayasan Kita Menulis, 2024.
- Theresia, Aprilia, Krishna S. Andini, Prima G.P Nugraha, and Totok Mardikanto. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Tojiri, Yusuf, Hari Setia Putra, and Nur Faliza. *Dasar Metodologi Penelitian : Teori, Desain Dan Analisis Data*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2023.

Yuliastina, Roos, and Isyanto. *Pengantar Metode Penelitian Sosial*. Pamekasan: Wiraja Press, 2024.



# LAMPIRAN

PAREPARE

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b> <b>FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH</b> <b>Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421) 21307</b> <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b>
---	--

Nama : Nita Rahmayanti  
 NIM : 2020203870231016  
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
 Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Wawancara dengan Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare**

1. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memfasilitasi akses perempuan terhadap sumber daya sosial ekonomi di Kota Parepare ?
2. Apa bentuk fasilitas dari program yang dijalankan oleh untuk mendukung perempuan di Kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi ?
3. Apa saja pelatihan atau edukasi yang diselenggarakan oleh untuk mengembangkan keterampilan perempuan ?
4. Seberapa sering program pemberdayaan ini dilaksanakan ?

5. Bagaimana memastikan bahwa informasi dan edukasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan perempuan di Kota Parepare ?
6. Apa saja media dan saluran komunikasi yang digunakan dalam menyebarkan informasi ?
7. Bagaimana melakukan semangat sosial untuk meningkatkan partisipasi perempuan di Kota Parepare ?
8. Apakah ada bentuk kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan pihak lain dalam mendukung partisipasi sosial ekonomi perempuan di Kota Parepare ?
9. Bagaimana strategi dalam mengidentifikasi isu-isu dan kebutuhan perempuan di Kota Parepare ?
10. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memfasilitasi pembangunan konsensus diantara para pemangku kepentingan terkait peningkatan partisipasi sosial ekonomi perempuan ?
11. Apa saja sumber daya yang dimanfaatkan dalam meningkatkan partisipasi sosial ekonomi perempuan ?
12. Bagaimana berperan dalam mengorganisir dan mengelola program-program peningkatan partisipasi sosial ekonomi perempuan ?
13. Bagaimana mengontrol dan mengelola anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan perempuan ?



Nama : Nita Rahmayanti  
 NIM : 2020203870231016  
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
 Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Wawancara dengan Perempuan Penerima Manfaat**

#### **1. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Parepare ?**

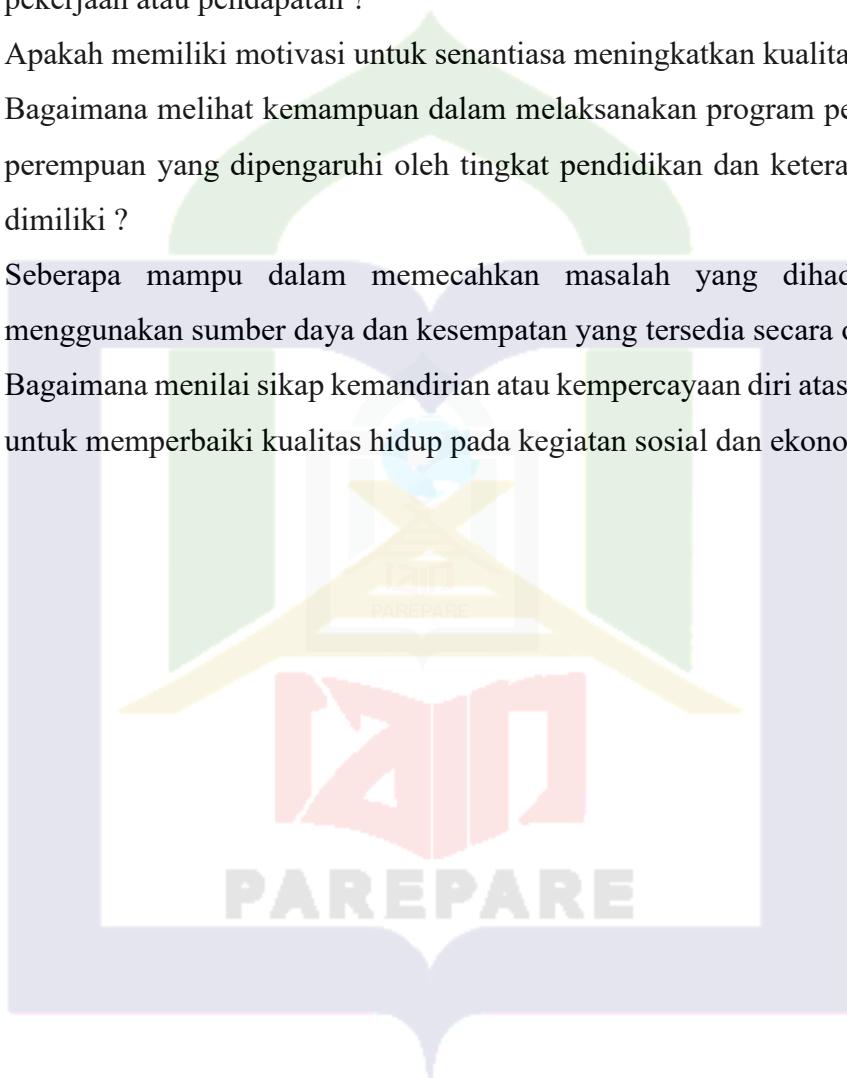
- 1) Bagaimana keyakinan diri yang dimiliki dapat berpartisipasi di kegiatan sosial ?
- 2) Apakah merasa mampu untuk terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat ?
- 3) Bagaimana hubungan dengan anggota masyarakat lainnya dan seberapa erat rasa solidaritas yang dirasakan dalam komunitas ?

- 4) Sejauh mana merasakan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial di lingkungan dan apakah memiliki komitmen untuk terlibat dalam upaya-upaya perbaikan ?
- 5) Apakah merasa mampu untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya perubahan dan perbaikan kondisi di masyarakat ?
- 6) Apakah pernah mengusulkan atau memulai suatu inisiatif di masyarakat dan bagaimana tanggapan mereka terhadap inisiatif yang dilakukan ?
- 7) Sejauh mana mempertimbangkan kepentingan umum dalam partisipasi dan kegiatan sosial dan bagaimana menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum ?
- 8) Bagaimana keterlibatan dalam organisasi dan pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat dan apakah merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil telah rasional dan efisien ?
- 9) Sejauh mana keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat dan bagaimana menikai proses musyawarah dan pengambilan keputusan secara bersama-sama ?
- 10) Apakah merasa peka dan tanggap terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang ada dan bagaimana menilai kepedulianan perempuan lain terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan umum ?

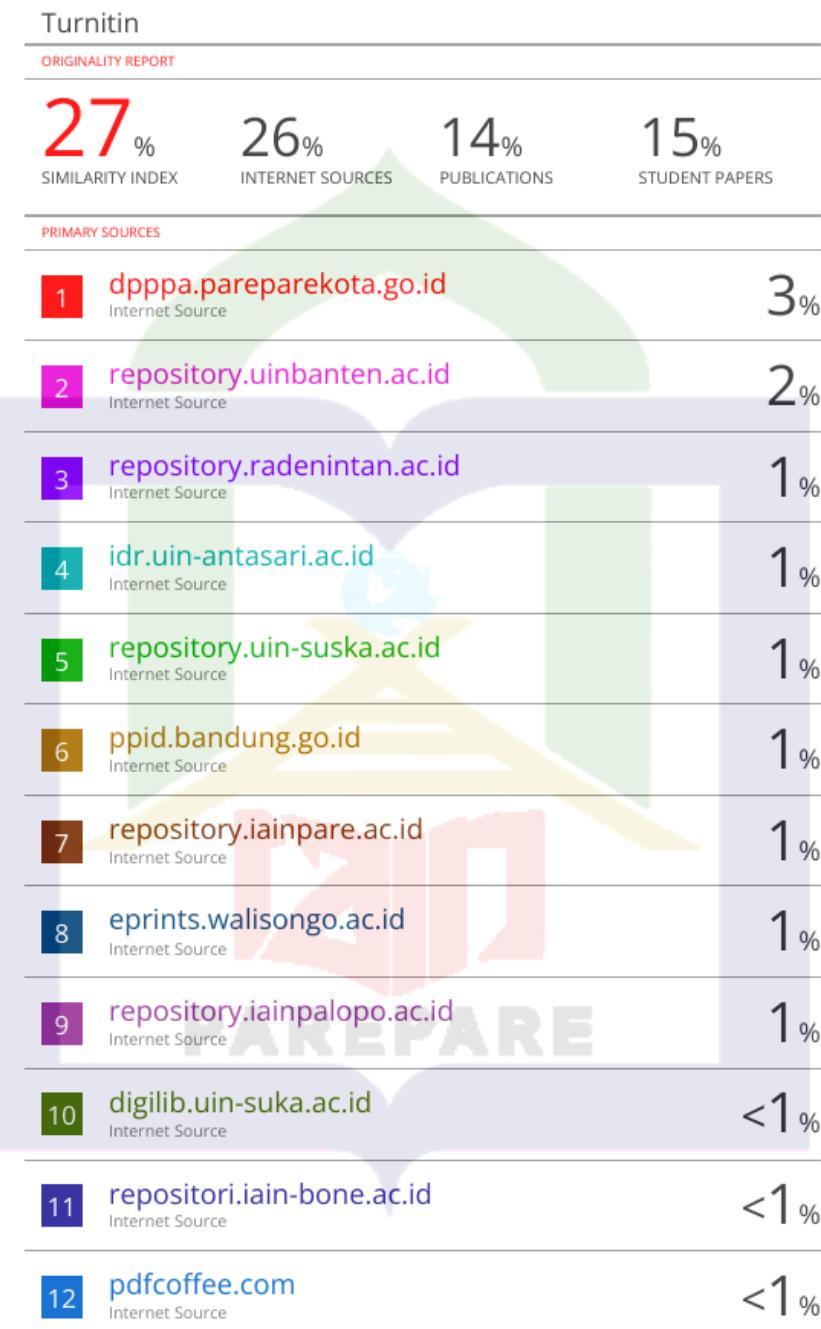
## **2. Bagaimana Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan Setelah Pemberdayaan Perempuan di Kota Parepare ?**

- 1) Apakah teknak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pemberdayaan perempuan baik dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan ?
- 2) Darimana memperoleh informasi mengenai kapan dan dalam bentuk apa saja dapat ikut berpartisipasi ?
- 3) Apakah diberikan akses yang memadai untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan ?

- 4) Bagaimana menilai ketersediaan dan kemudahan akses terhadap peralatan atau perlengkapan penunjang pemberdayaan perempuan ?
- 5) Apakah merasa memiliki kebebasan dan kesempatan untuk berorganisasi ?
- 6) Bagaimana program pemberdayaan ini, memperbaiki kualitas mutu hidup, baik pekerjaan atau pendapatan ?
- 7) Apakah memiliki motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup ?
- 8) Bagaimana melihat kemampuan dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki ?
- 9) Seberapa mampu dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan kesempatan yang tersedia secara optimal ?
- 10) Bagaimana menilai sikap kemandirian atau kempercayaan diri atas kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup pada kegiatan sosial dan ekonomi ?



## Lampiran 2 : Turnitin



### Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian

SRN IP 0000805

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmppts@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 805/IP/DPM-PTSP/11/2024**

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADА : **NITA RAHMAYANTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**  
 ALAMAT : **JL. JEND. AHMAD YANI KOTA PAREPARE**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 November 2024 s.d 06 Desember 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **11 November 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)  
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSe**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



**Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax, (0421) 24  
PO BOX 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: mail.iainpare.ac.id

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl Bau Massape

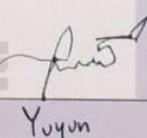
Pekerjaan : Penjahit

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nita Rahmayanti yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan semestinya.

Parepare, 21 November 2024

**PAREPARE**

  
Yuyun

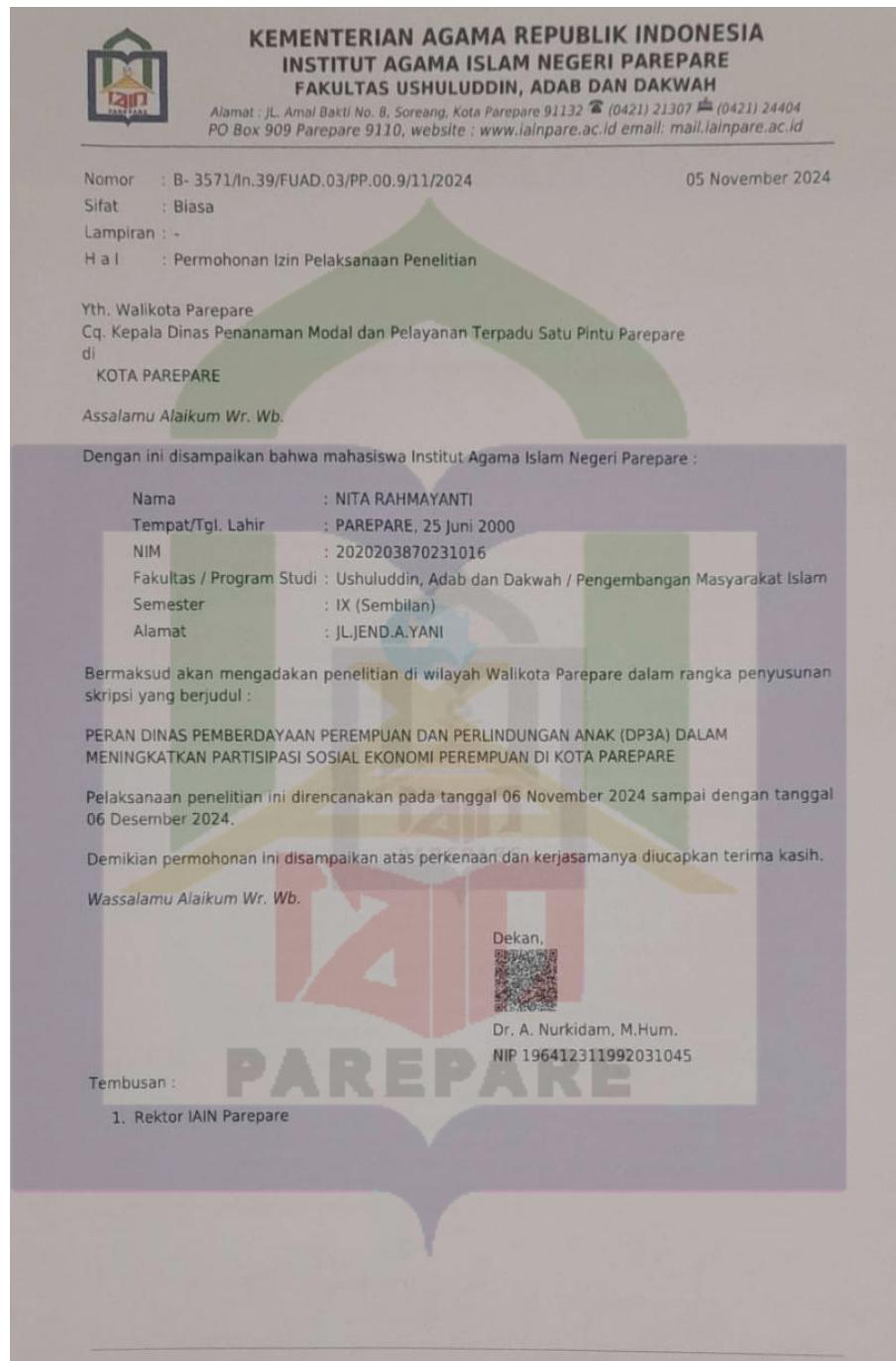




## **Lampiran 5 : Surat Penetapan Pembimbing**



## Lampiran 6 : Surat Izin Melaksanakan Penelitian



## Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Meneliti



**Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara**

Wawancara Bersama Ibu Sriyanti Ambar S.KM. M.Kes. (Kepala Bidang Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare)



Wawancara Bersama Ibu Yuyun (Penjahit)



Wawancara Bersama Ibu Bina (Pramuniaga)



Wawancara Bersama Ibu Lidia (Pedagang Kecil)

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Nita Rahmayanti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 25 Juni 2000. Penulis menempuh Pendidikan di SD Negeri 29 Parepare, kemudian di SMP Negeri 10 Parepare dan selanjutnya, di SMA Negeri 1 Parepare. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD).

Penulis fokus menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Parepare.”

